

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 4.1.1 Profil Kecamatan Kepanjen

Kecamatan Kepanjen merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang terletak di pusat pemerintahan yang terdapat kantor-kantor Dinas Tingkat Kabupaten. Kecamatan Kepanjen terdiri dari 18 desa dan 4 desa diantaranya sudah terbentuk Kelurahan yang pejabatnya sudah berstatus PNS. Luas wilayah Kecamatan Kepanjen ini sendiri secara keseluruhan mencapai  $\pm 4624$  Ha. Sedangkan untuk luas lahan pertaniannya  $\pm 4387,7$  Ha yang terdiri dari lahan sawah teknis  $\pm 2431$  Ha, lahan tegal  $\pm 1179$  Ha dan lahan pekarangan  $\pm 795,7$  Ha. Selain itu, apabila dilihat dari kondisi topografinya, Kecamatan Kepanjen berada pada ketinggian rata-rata  $\pm 440$  dpl dengan kondisi tanah yang subur. Sedangkan bila dilihat dari musim, Kecamatan Kepanjen memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Adapun dibawah ini merupakan batas administrasi Kecamatan Kepanjen, yaitu:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kromengan dan Ngajum.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Pagak.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bululawang.

#### 4.1.2 Keadaan Umum Penduduk

Keadaan penduduk merupakan kelompok manusia yang menempati suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Dalam penelitian ini, keadaan penduduk dibagi menjadi empat karakteristik, yaitu: (1) jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, (2) jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia, (3) jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan (4) jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian. Kecamatan Kepanjen sendiri terdiri dari 4 kelurahan, 14 desa, 45 dusun, 77 RW dan 467 RT.

#### 4.1.2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kecamatan Kepanjen berdasarkan data desa tahun 2015 berjumlah 93.347 jiwa yang terdiri dari laki-laki 45.350 jiwa dan perempuan 47.997 jiwa. Kepala Keluarga (KK) Tani berjumlah 4.634 kk. Penduduk tersebut rata-rata beragama Islam.

Tabel 3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1.	Laki-laki	45.350	48,6
2.	Perempuan	47.997	51,4
	Jumlah	93.347	100,0

Sumber : *Data Monografi Kecamatan Kepanjen 2015*

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kecamatan Kepanjen hampir seimbang diantara keduanya namun cenderung masih lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin perempuan dengan presentase 51,4% penduduk perempuan dan 48,6% penduduk laki-laki. Selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sejumlah 2,8% atau 2.647 jiwa.

#### 4.1.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Komposisi jumlah penduduk yang dilihat berdasarkan usia sangat penting untuk diketahui karena usia penduduk menunjukkan berapa besar potensi yang dimiliki penduduk dalam suatu daerah. Adapun informasi keadaan penduduk di Kecamatan Kepanjen berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2015

No.	Tingkat Usia (Tahun)	Jumlah (Usia)	Persentase (%)
1.	0 – 7	10.081	10,8
2.	8 – 18	15.682	16,8
3.	19 – 56	54.701	58,6
4.	> 56	12.883	13,8
	Jumlah	93.347	100,0

Sumber : *Data Monografi Kecamatan Kepanjen 2015 (diolah)*

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa penduduk yang tergolong produktif dan banyak dibutuhkan dalam tenaga kerja pertanian dengan rentang usia 19 – 56 tahun sebanyak 54.701 jiwa atau sekitar 58,6% dari jumlah penduduk. Penduduk pada usia produktif ini merupakan jumlah usia yang paling banyak di Kecamatan



Kepanjen sedangkan jumlah penduduk yang termasuk dalam usia 0 – 18 tahun sebanyak 25.763 jiwa atau sekitar 27,6% dari semua total penduduk di Kecamatan Kepanjen, sedangkan usia tidak produktif yaitu >56 tahun yaitu sebanyak 12.883 jiwa atau sekitar 13,8% dari jumlah penduduk.

#### 4.1.2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat menggambarkan kemajuan penduduk suatu daerah. Adanya pendidikan yang memadai maka suatu daerah dapat berkembang dengan adanya pengetahuan, inovasi dan teknologi baru dalam usaha yang dijalankan. Adanya pendidikan yang tinggi, masyarakat dengan mudah menerima munculnya suatu perubahan baru di lingkungan sekitarnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Belum Sekolah	5.974	6,4
2.	Tidak Pernah Sekolah	1.341	1,4
3.	Tidak Tamat SD/MI	10.319	11,1
4.	Tamat SD/ MI	42.112	45,1
5.	Tamat SLTP/MTS	16.705	17,9
6.	Tamat SLTA/MA	14.683	15,7
7.	Tamat Perguruan Tinggi	2.213	2,4
Jumlah		93.347	100,0

Sumber : Data Monografi Kecamatan Kecamatan 2015

Pada Tabel 5 dapat dilihat dari jumlah keseluruhan penduduk yang berada di Kecamatan Kepanjen sebagian besar sudah mendapatkan fasilitas pendidikan, namun terdapat 5.974 jiwa yang tidak pernah sekolah atau sekitar 6,4% dari total jumlah penduduk serta masih banyak masyarakat yang tidak tamat SD yaitu sebanyak 10.319 jiwa atau sekitar 11,1% dari total jumlah penduduk di Kecamatan Kepanjen. Tingginya persentase penduduk yang sudah menempuh pendidikan akan berpengaruh terhadap kemajuan tingkat teknologi dan inovasi yang berkembang.

#### 4.1.2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Dilihat dari segi mata pencahariannya, sebagian besar penduduk di Kecamatan Kepanjen bekerja di sektor pertanian tanaman pangan baik yang berperan sebagai petani ataupun hanya sebagai buruh tani. Untuk lebih jelasnya komposisi penduduk di Kecamatan Kepanjen berdasarkan profesinya masing-masing dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2015

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Pertanian	50.594	54,2
2.	Perkebunan	1.680	1,8
3.	Peternakan	747	0,8
4.	Perikanan	187	0,2
5.	Buruh Tani	24.364	26,1
6.	Buruh Pabrik	2.987	3,2
7.	Pedagang	3.734	4,0
8.	Tukang	3.080	3,3
9.	PNS	3.921	4,2
10.	TNI/POLRI	373	0,4
11.	Pegawai Swasta	840	0,9
12.	Home Industri	747	0,8
	Jumlah	93.254	100,0

Sumber : Data Monografi Kecamatan 2015 (diolah)

Dari Tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Kepanjen mayoritas adalah petani dengan jumlah 50.594 jiwa atau sekitar 54,2% dari total penduduk yang termasuk tenaga kerja. Profesi tertinggi ke dua masih berhubungan dengan sektor pertanian yaitu sebagai buruh tani yaitu 24.364 jiwa atau sekitar 26,1% dari total tenaga kerja. Jika dilihat secara keseluruhan penduduk yang bekerja di sektor pertanian baik yang sebagai petani ataupun sebagai buruh tani yaitu sebanyak 74.958 penduduk atau sekitar 80,4% dari jumlah tenaga kerja. Untuk profesi dengan jumlah terendah di Kecamatan Kepanjen yaitu pada sektor perikanan yaitu sebanyak 187 jiwa atau sekitar 0,2% dari jumlah tenaga kerja kemudian disusul oleh profesi sebagai TNI/POLRI yaitu sebanyak 373 jiwa atau sekitar 0,4% dari jumlah total tenaga kerja. Sehingga mayoritas penduduk di Kecamatan Kepanjen tergantung dengan sektor pertaniannya, hal tersebut dirasa wajar karena lahan sawah yang dimiliki



penduduk di Desa Kemiri seluas 4387,7 Ha atau sekitar 94,9% dari total luas Kecamatan Kapanjen.

### 4.1.3 Keadaan Umum Penyuluh

#### 4.1.3.1 Profil Penyuluh Pertanian

Profil penyuluh pertanian di Kecamatan Kapanjen yaitu meliputi data tentang usia, pendidikan, pangkat/golongan, jabatan penyuluh, wilayah binaan dan jumlah kelompok binaan. Data-data tersebut yang digunakan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki penyuluh karena dapat mempengaruhi kinerja yang dimiliki penyuluh. Misalnya, semakin tua usia penyuluh maka akan semakin banyak pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan, begitu pula sebaliknya semakin muda usia penyuluh maka kemungkinan pengetahuan dan pengalamannya masih kurang dalam melakukan kegiatan penyuluhan. Data lebih jelasnya mengenai karakteristik penyuluh dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Profil Penyuluh Pertanian UPT BP Kecamatan Kapanjen

No	Nama Penyuluh (Partisipan)	Usia	Pendidikan	Pangkat/Golongan	Jabatan Penyuluh	Wilayah Binaan	Jumlah Kelompok Binaan
1.	Suwarno, SP	53	S1	Penata Tingkat 1/ III d	Penyuluh Pertanian Muda	Kec. Kapanjen	-
2.	Purnadi K.U, SP	51	S1	Pembina/ Iva	Penyuluh Pertanian Madya	Jenggolo dan Panggun grejo	8
3.	Yacho Nardi, SP	58	S1	Pembina/ Iva	Penyuluh Pertanian Madya	Talangagung dan Panggun grejo	7
4.	Ferly P. Tambunan, SP, M.Agr	41	S2	Penata Tingkat 1/ III d	Penyuluh Pertanian Muda	Jatirejoyoso dan Merjosari	9
5.	Sutrisno, SP	51	S1	Penata/ III c	Penyuluh Pertanian	Curungrejo dan Sukoraharjo	10

Tabel 7. Profil Penyuluh Pertanian UPT BP Kecamatan Kepanjen (Lanjutan)

No	Nama Penyuluh (Partisipan)	Usia	Pendidikan	Pangkat/ Golongan	Jabatan Penyuluh	Wilayah Binaan	Jumlah Kelompok Binaan
6.	Rini Ilham M, SP	36	S1	Penata Muda/ IIIa	Penyuluh Pertanian	Dilem dan Ngadilangkung	8
7.	Kartika Fitri M, S.Pi	30	S1	Penata Muda/ IIIa	Penyuluh Perikanan Pertama	Kepanjen, Cempokomulyo, Ardirejo dan Panarukan	7
8.	Zedin Oktavia, SP	39	S1	THL-TBPP	Penyuluh	Tegalsari dan Kedungpedaringan	5
9	Ida setyoning sih, S.Pt	32	S1	THL-TBPP	Penyuluh	Sengguruh dan Kemiri	6

Sumber: UPT BP Kecamatan Kepanjen Tahun 2016 (diolah)

Pada data Tabel 7, dapat dilihat perbedaan antara penyuluh satu dengan lainnya baik dari segi usia, pendidikan, pangkat, jabatan, wilayah binaan dan jumlah kelompok binaan. Perbedaan tersebut yang menjadi faktor dalam mempengaruhi suatu kegiatan penyuluhan. Apabila dilihat dari segi usia, maka disimpulkan bahwa usia penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen antara 30 – 58 tahun. Hal ini merupakan usia yang masih terbilang produktif. Pada usia tersebut penyuluh masih memiliki kemampuan berfikir dan bekerja relatif lebih produktif karena mereka masih memiliki kondisi fisik yang kuat dan mampu untuk berkembang lagi dalam menerima inovasi dan informasi baru. Apabila dilihat dari segi pendidikan penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen, rata-rata penyuluh memiliki pendidikan terakhir adalah S1. Hal ini tentunya sudah cukup baik dalam peranannya sebagai penyuluh karena telah memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan penyuluhan.



Sedangkan apabila dilihat dari segi pangkat/golongan dan jabatan penyuluh, rata-rata terdiri dari pangkat petana dan jabatan sebagai penyuluh pertanian. Pada hakikatnya faktor pangkat/golongan dan jabatan penyuluh tidak terlalu mempengaruhi dalam kegiatan penyuluhan. Hal ini dikarenakan pangkat/golongan dan jabatan penyuluh hanya sebagai tanda kedudukan para penyuluh, misalnya dalam hal organisasi dan penempatan kerja. Apabila dilihat di lain sisi yaitu pada wilayah binaan dan jumlah kelompok binaan, rata-rata setiap penyuluh bertanggung jawab pada 2-4 desa dengan jumlah kelompok binaan 5-10 kelompok.

#### 4.1.3.2 Visi dan Misi UPT BP Kecamatan Kepanjen

Visi dan Misi UPT BP (Unit Pelaksana Tennis Balai Penyuluhan) Kecamatan Kepanjen, yaitu:

##### 1. VISI

Visi UPT BP (Unit Pelaksana Tennis Balai Penyuluhan) Kecamatan Kepanjen, yaitu:

“Sebagai Rujukan Petani”

Maksudnya adalah UPT BP diharapkan dapat menjadi tempat yang didatangi para petani dalam mencari informasi terkait dunia pertanian, perikanan dan kehutanan guna membantu petani dalam mengatasi permasalahan bai dari segi pertanian, perikanan maupun kehutanan. Hal ini didukung dengan pernyataan penyuluh pertanian yaitu Bapak Suwarno (penyuluh berusia 53 tahun) selaki kepala UPT BP Kecamatan Kepanjen sebagai berikut:

*“Visi UPT BP itu sendiri merupakan sebagai harapan agar UPT BP dapat menjadi tempat rujukan atau pemberian informasi untuk petani terkait permasalahan petani, baik dari segi pertanian, perikanan maupun kehutanan agar petani dapat memecahkan permasalahan tersebut dari informasi dari UPT BP. Informasi tersebut dapat berupa pengetahuan, gagasan atau inovasi baru dan pemecahan masalah”*

## 2. MISI

Dalam rangka mencapai misi tersebut, maka ditetapkan misi, yaitu:

- a. Memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal dalam rangka pembangunan usaha pertanian yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.
- b. Memberdayakan masyarakat tani menuju masyarakat agribisnis yang mandiri, maju dan menguntungkan untuk kesejahteraan keluarga tani.

Untuk menunjang sasaran tersebut, maka kebijakan penyuluhan pertanian diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan petani pada khususnya melalui pembangunan sistem informasi penyuluhan, pendidikan dan pelatihan spesifik lokasi sesuai kebutuhan petani dan sifatnya berkelanjutan diantara dengan metode Magang Petani, GP (Gerakan Penerapan), dan lain-lain.

Dengan demikian, Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan merupakan program yang terintegrasi dengan seluruh program UPT BP Kecamatan Kepanjen yang sekaligus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi petani yang terserap melalui mekanisme komunikasi yang efisien dan efektif seperti supervisi, temu wicara, pelatihan dan kunjungan lain-lain yang tentunya memperhatikan faktor sosial, ekonomi dan kemampuan masyarakat dan aparat yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian (RKPP) (UPT BP Kepanjen,2015).

### 4.1.3.3 Rencana Strategis

Rencana kegiatan UPT. Balai Penyuluhan Kecamatan Kepanjen juga mengacu pada tujuan peningkatan kemampuan dan ketrampilan petani dalam menerapkan Teknologi Pertanian. Semua kegiatan penyuluhan diharapkan akan lebih terarah dan terencana dengan baik dan tetap mempertimbangkan yang ada di daerah. Untuk itu rencana kegiatan penyuluhan di Kecamatan Kepanjen antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan sikap dan ketrampilan petani dan juga kelompok tani dengan cara rutin melakukan kunjungan kelompok tani, temu wicara, demplot tani dan kajian.



2. Meningkatkan kesadaran petani dan kelompok tani dengan cara rutin melakukan kunjungan rutin kelompok tani, temu wicara, demplot tani dan kajian.
3. Meningkatkan kompetensi petani agar dapat memilih komoditas yang lebih menguntungkan untuk dilakukan usahatani dengan cara kunjungan kelompok tani, survei pasar dan survei tanaman pangan.
4. Meningkatkan kemampuan petani untuk bercocok tanam agar dapat memanfaatkan pekarangan yang dimilikinya dengan baik dengan cara kunjungan rutin kelompok tani, kajian dan KRPL.
5. Menciptakan petani yang tangguh sehingga mampu mengatasi masalah yang dihadapinya dengan cara rutin melakukan kunjungan kelompok tani.
6. Meningkatkan kemampuan penyuluh mengenai teknologi baru yang dikembangkan dengan cara studi banding di daerah lain dan temu teknis para penyuluh.
7. Meningkatkan kesadaran petani untuk bergabung dalam kelompok tani dengan cara aktif penyuluhan, penilaian dan pembinaan kelas kelompok.
8. Meningkatkan kemampuan kelompok tani dengan cara pertemuan rutin Gaopoktan.
9. Meningkatkan kemampuan dari Gapoktan dengan cara melaksanakan studi banding.
10. Meningkatkan kemampuan penyuluh lapang dalam bidang administrasi dan keuangan kelompok agar petani juga mengetahui tentang administrasi dan keuangan kelompok dengan cara melakukan latihan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petani dalam penerapan teknologi pertanian, maka UPT BP Kecamatan Kepanjen perlu menyusun rencana kegiatan penyuluhan yang sesuai dengan tujuan, keadaan lingkungan dan petani setempat. Rencana tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani, meningkatkan kesadaran petani dan kelompok tani, meningkatkan kompetensi petani, meningkatkan kemampuan petani dalam bercocok tanam, menciptakan petani yang tangguh, meningkatkan kemampuan penyuluh,

meningkatkan kemampuan kelompok tani dari Gapoktan, dan meningkatkan kemampuan penyuluh lapang (UPT BP Kepanjen, 2015).

#### **4.1.4 Karakteristik Partisipan**

Karakteristik partisipan merupakan salah satu hal penting yang dapat membantu kelancaran pada sebuah penelitian untuk memperoleh informasi tentang kondisi atau keadaan partisipan secara umum di daerah penelitian serta status partisipan tersebut. Data karakteristik partisipan ini didapatkan dari data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang ciri-ciri individu yang terdapat pada ketua kelompok tani yang digunakan untuk membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan Kepanjen. Karakteristik partisipan yang akan digunakan meliputi usia, pendidikan dan kelas kelompok tani. Partisipan dalam penelitian ini adalah ketua kelompok tani di Kecamatan Kepanjen dengan jumlah partisipan 11 orang dan 9 penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen.

##### **4.1.4.1 Karakteristik Partisipan Berdasarkan Usia**

Usia merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur aktivitas seseorang. Banyaknya kegiatan yang dilakukan seseorang tergantung pada usia yang dia miliki. Semakin tua usia seseorang maka akan membatasi ruang aktifitasnya. Usia akan mempengaruhi fisik bekerja dan cara berfikir, semakin tua akan semakin berpengalaman sehingga semakin baik dalam bekerja. Namun disisi lain, semakin tua maka akan semakin menurun kemampuan fisiknya sehingga semakin memerlukan bantuan tenaga kerja, baik dalam keluarga maupun dari luar keluarga (Suratiyah, 2008). Sesuai dengan data yang diperoleh, 11 petani yang sebagai partisipan memiliki tingkat usia yang berbeda-beda. Berikut identitas partisipan berdasarkan usia di Kecamatan Kepanjen dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:



Tabel 8. Karakteristik Partisipan Berdasarkan Usia di Kecamatan Kepanjen

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	35 – 45	1	9,1
2.	46 – 55	6	54,5
3.	56 – 65	3	27,3
4.	66 – 75	1	9,1
	Total	11	100,0

Sumber : Data Primer, 2016 (diolah)

Tabel 8 telah menunjukkan bahwa dari 11 jumlah partisipan terdapat sebagian besar memiliki usia produktif karena berada direntang usia antara 15 – 64 tahun (Sugiharsono, 2008). Dari hasil penelitian, petani pada usia 46 – 65 merupakan ketua kelompok tani yang termasuk senior. Pada usia tersebut ketua kelompok tani memiliki kemampuan berpikir dan bekerja relatif lebih produktif karena mereka masih mempunyai keinginan untuk berkembang dan kondisi yang masih sehat serta mampu menerima dengan cepat inovasi dan informasi yang ada. Namun, masih ada juga petani yang sudah berumur atau tua dan masih melakukan kegiatan penyuluhan yaitu 1 orang atau sekitar 9,1% dari jumlah total partisipan.

#### 4.1.4.2 Karakteristik Partisipan Berdasarkan Pendidikan

Salah satu faktor penentu dalam kematangan pola pikir seseorang adalah tingkat pendidikan yang telah mereka tempuh. Secara umum, orang dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung membuka wawasannya terhadap inovasi-inovasi baru dibanding mereka yang tingkat pendidikannya tergolong rendah. Hal itulah yang menjadikan orang dengan tingkat pendidikan tinggi lebih banyak maju dibandingkan mereka yang tingkat pendidikannya rendah. Berikut karakteristik partisipan berdasarkan tingkat pendidikannya di Kecamatan Kepanjen dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Karakteristik Partisipan Berdasarkan Pendidikan di Kecamatan Kepanjen

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	SD	3	27,3
2.	SLTP	2	18,2
3.	SLTA	4	36,4
4.	D3	1	9,1
5.	S1	1	9,1
	Total	11	100,0

Sumber : Data Primer, 2016 (diolah)

Tabel 9 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani telah menyelesaikan pendidikan terakhir yaitu pada tingkat SLTA dengan jumlah 4 orang atau setara dengan 36,4% dari total partisipan. Sedangkan partisipan yang memiliki tingkat pendidikan di D3 hanya 1 orang setara dengan 9,1% dari total partisipan dan petani yang tingkat pendidikan terakhirnya di S1 sebanyak 1 orang yang setara dengan 9,1% dari total partisipan. Sebagian besar petani telah memiliki pendidikan SMA cukup baik, maka hal ini bermanfaat sebagai petani. Sedangkan dengan petani yang pendidikan terakhirnya D3 dan S1 menandakan bahwa ketua kelompok tani dapat lebih baik lagi dalam memimpin kelompoknya, karena ketua kelompok tani tersebut telah memiliki bekal pendidikan yang lebih baik dari pada ketua kelompok tani yang memiliki pendidikan SMA.

#### 4.1.4.3 Karakteristik Partisipan Berdasarkan Kelas Kelompok Tani

Kelas kelompok tani merupakan pengelompokan petani menurut dengan kemampuannya. Kelas kelompok tani sangat penting untuk diketahui agar penyuluh dapat melakukan penyuluhan sesuai dengan kemampuannya. Kelas kelompok tani di Kecamatan Kepanjen terdiri dari kelas kelompok tani lanjut dan pemula. Berikut karakteristik partisipan berdasarkan kelas kelompok tani di Kecamatan Kepanjen dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Karakteristik Partisipan Berdasarkan Kelas Kelompok Tani di Kecamatan Kepanjen

No.	Kelas Kelompok Tani	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Lanjut	10	90,9
2.	Pemula	1	9,1
	Total	11	100,0

Sumber : Data Primer, 2016 (diolah)

Tabel 10 diatas dapat disimpulkan bahwa petani di Kecamatan Kepanjen berada pada kelompok kelas lanjut dengan banyak partisipan 10 orang atau setara dengan 90,0% dari total partisipan. Sedangkan petani yang termasuk kelas pemula sebanyak 1 orang atau setara dengan 9,1% dari total partisipan. Hal ini menunjukkan bahwa petani di Kecamatan Kepanjen sebagian besar cukup mampu dalam menjalankan tugas serta perannya.



#### 4.2 Pola Kerja Penyuluh Pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen di Era Desentralisasi

Pola kerja adalah pembentukan sebuah struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat pola-pola bagian dari sebuah organisasi atau anggota kelompok. Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen (Schein, 1992). Pola kerja penyuluhan sangat penting diketahui untuk menunjang kegiatan penyuluhan itu sendiri. Pola kerja digunakan untuk mengetahui bagaimana kegiatan penyuluhan itu berlangsung. Di era saat ini pola kerja harus sesuai dengan pedoman Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006. Hal ini guna untuk memperbaiki kinerja penyuluh pertanian dalam meningkatkan kualitas petani. Di bawah ini akan dilihat perbedaan pola kerja penyuluh pertanian UPT BP Kecamatan Kepanjen sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006.

Tabel 11. Perbedaan Pola Kerja Penyuluh Pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen setelah dan sebelum adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006

No	Sebelum UU-SP3K	Setelah UU-SP3K
1.	Dibawah wewenang pemerintah pusat.	Dibawah wewenang pemerintah daerah.
2.	Jadwal pertemuan/ kunjungan ditentukan penyuluh.	Jadwal pertemuan ditentukan oleh petani.
3.	Metode penyuluhan menggunakan pendekatan perorangan.	Metode penyuluhan menggunakan pendekatan kelompok.
4.	Materi yang diberikan belum tentu sesuai dengan kebutuhan petani.	Materi yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi petani.
5.	Penyuluh sebagai agen transfer teknologi dan informasi.	Penyuluh sebagai rekan berdiskusi.

Sumber : Data Primer, 2016 (diolah)

Dari Tabel 11 diatas dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan yang terjadi pada pola kerja penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen setelah dan sebelum adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006. Perbedaan yang signifikan tersebut akan membawa pada perubahan dalam kegiatan

penyuluhan di UPT BP Kecamatan Kepanjen, seperti pada sistem pengorganisasian penyuluhan yang terkait juga dengan kelembagaan, metode pendekatan, strategi penyuluhan serta pola penyuluhan. Berikut untuk lebih jelasnya tentang penjelasan pola kerja penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen yaitu sebagai berikut:

#### **4.2.1 Sistem Pengorganisasian Penyuluh Pertanian**

Sistem pengorganisasian penyuluh pertanian merupakan sistem organisasi penyuluh pertanian yang menyangkut tentang kelembagaan penyuluhan pertanian. Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan salah satu wadah organisasi yang terdapat dalam dinas pertanian. Fungsi dari kelembagaan penyuluhan pertanian adalah sebagai wadah dan organisasi pengembangan sumberdaya manusia pertanian serta menyelenggarakan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan sangatlah penting perannya dalam suatu kegiatan penyuluhan, karena dengan kelembagaan penyuluhan kegiatan penyuluhan dapat terorganisir dengan optimal. Akan tetapi, perubahan yang terus menerus terjadi pada kelembagaan penyuluhan membuat dunia penyuluhan menjadi rumit. Kerumitan ini tentunya berpengaruh terhadap kegiatan penyuluhan, seperti terbengkalainya sistem penyuluhan sehingga menghambat kegiatan penyuluhan.

Kelembagaan yang terdapat di Kecamatan Kepanjen juga sering mengalami perubahan dengan sistem pengorganisasiannya, hal ini terlihat dari pergantian pimpinan daerah seperti camat. Kecamatan Kepanjen yang sekarang ini telah menjadi ibu kota Kabupaten Malang tidak terlepas dari otonomi daerah yang sedang berkembang dengan baik. Kesadaran Kabupaten Malang untuk membangun wilayahnya sendiri dengan lebih optimal. Disisi lain, dampak perkembangan otonomi daerah telah menggeser peran kecamatan dalam pemerintahannya. Dimana kecamatan yang semula menggunakan pendekatan wilayah menjadi perangkat daerah, dampaknya adalah pergeseran kewenangan yang dimiliki camat. Sehingga hal ini tentunya berpengaruh dalam pola penyuluhan pertanian. Salah satu yang sangat terlihat perubahannya adalah dalam penanggung jawab atas kewenangan kegiatan penyuluhan. Pada era saat ini, setelah adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No.16 Tahun 2006 penanggung jawab atas kewenangan kegiatan



penyuluhan berubah yaitu berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), sebaliknya pada saat sebelum Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No.16 Tahun 2006 penanggung jawab atas kewenangan kegiatan penyuluhan adalah Pemerintah Pusat.

Pemberlakuan Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No.16 Tahun 2006 memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mengatur kelembagaan daerah, sehingga kelembagaan penyuluhan yang ada di daerah bervariasi. Sebelum adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No.16 Tahun 2006, pada 2004 penyuluh masih berada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan atau dinas masing-masing penyuluh, seperti penyuluh pertanian yang masih berada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Setelah itu, terdapat perkembangan yang dikarenakan kurang efektif dan efisiennya struktur tersebut dalam melakukan pembinaan secara bersama-sama dalam kegiatan penyuluhan. Sehingga, pada saat tahun 2008 Pemerintah Daerah menempatkan semua penyuluh di Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) yang merupakan instalasi kelembagaan penyuluhan pertanian. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu penyuluh pertanian yaitu Bapak Ferly (penyuluh berusia 41 tahun) sebagai berikut:

*“Dulu pada tahun 2004, penyuluh masih bertempat di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, tetapi pada tahun 2008 oleh pemerintah daerah penyuluh dipindahkan ke BIPP. Hal ini dikarenakan struktur yang digunakan kurang efektif dan efisien dalam melakukan pembinaan secara bersama-sama. Kurang efektif dan efisiennya struktur tersebut dikarenakan sistem penugasan antara dinas dan penyuluhan berbeda, maksudnya adalah dinas pertanian lebih memiliki tanggung jawab dalam membuat kebijaksanaan harga yang adil, penyediaan prasarana dan sarana produksi, pemasaran dan lainnya yang bersangkutan dengan sub-sub sektor, sedangkan penyuluh bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penyuluhan, penyediaan informasi dan penyebaran teknologi baru dan unggul yang kompetitif “*

Paparan salah satu penyuluh diatas maka dapat diketahui bahwa kurang efektif dan efisiennya struktur pengorganisasian dikarenakan sistem penugasan yang berbeda antara dinas dan penyuluhan. Perbedaan yang dimaksud adalah dinas pertanian yang lebih memiliki tanggung jawab dalam hal membuat kebijaksanaan harga yang adil, penyediaan prasarana dan sarana produksi, pemasaran dan lainnya yang bersangkutan dengan sub-sub sektor. Sedangkan

penyuluh bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penyuluhan, penyediaan informasi dan penyebaran teknologi baru dan unggul yang kompetitif. Oleh karena itu penyuluh ditempatkan pada BIPP. Penempatan semua penyuluh pada BIPP ini diharapkan dapat lebih efektif dalam bekerja dan lebih terfokus untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Setelah penempatan semua penyuluh di BIPP, dibentuklah koordinator-koordinator di masing-masing kecamatan. Koordinator-koordinator yang berasal dari penyuluh inilah yang nantinya akan melakukan kegiatan penyuluhan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Dengan adanya koordinator-koordinator yang bekerja di setiap kecamatan, secara otomatis pemerintah seharusnya memberikan sarana dan prasarana bagi penyuluhan. Akan tetapi hal tersebut pada saat itu belum terwujudkan oleh pemerintah. Fasilitas kantor yang digunakan penyuluh, seperti bangunan untuk digunakan sebagai kantor masih ada yang dari bangunan lama, ada pula penyuluh yang menggunakan bangunan kontrakan sebagai kantor serta ada pula penyuluh yang bergabung dengan kantor kecamatan.

Pada tahun 2008 juga, BIPP mengalami perkembangan menjadi BIPP Model yang merupakan perkembangan dari BIPP yang diharapkan akan lebih efektif dan terfokus pada kegiatan penyuluhan ditingkat kelompok. Adanya BIPP Model ini cukup efektif dan terfokus, sehingga penyuluh dapat meningkatkan kegiatan penyuluhan pada petani khususnya ditingkat kelompok. Akan tetapi, dengan adanya sistem pemerintahan di Kabupaten Malang yang sering sekali mengalami pergantian pimpinan seperti halnya pergantian pimpinan camat yang dilakukan di Kecamatan Kepanjen yang diakibatkan perpindahan ibu kota Malang ke Kecamatan Kepanjen, maka para penyuluh pada tahun 2009 ditempatkan di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa para penyuluh dapat menjadi lebih optimal dalam memberikan pembinaan terhadap kelompok tani khususnya untuk peningkatan produksi pertanian secara umum. Dengan seiringnya waktu, pemerintah memberikan perkembangan lagi terhadap para penyuluh, yaitu dengan mempersempit lagi penempatan kerja para penyuluh. Hal ini dilakukan dengan cara membangun markas atau kantor penyuluh di masing-masing kecamatan yaitu dengan dibentuknya Badan Penyuluh Pertanian (BPP) pada tahun 2011. Strategi ini



dilakukan agar proses kegiatan penyuluhan yang dilakukan penyuluh dapat terfokus dan efektif dalam memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok tani.

Dengan seiringnya waktu dan keluarnya kebijakan tentang Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No.16 Tahun 2006, maka BPP dirubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan (UPTBP) pada tahun 2013 yang dikarenakan semua penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dijadikan satu. Hal ini diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan kegiatan penyuluhan di setiap Kecamatan di Kabupaten Malang. Kelembagaan penyuluhan yang terus mengalami perubahan menuntut penyuluh cepat beradaptasi dengan kondisi lingkungan kerja yang baru. Hal ini tentu mempengaruhi kinerja penyuluh. Untuk lebih singkat dan jelas terkait pola organisasi dalam hal penempatan penyuluh dapat dilihat dari data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan penyuluh sebagai berikut:

Tabel 12. *Hotline* Pola Organisasi Terkait Penempatan Penyuluh

Tahun	Keterangan
2004	Penyuluh ditempatkan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan atau dinas masing-masing
2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluh dipindah oleh Pemerintah Daerah di Badan Informasi Penyuluh Pertanian (BIPP)</li> <li>• BIPP berubah menjadi BIPP Model</li> </ul>
2009	Penyuluh ditempatkan di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKP3)
2011	Penyuluh ditempatkan di Badan Penyuluhan Pertanian (BPP)
2013	BPP diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan (UPT BP)

*Sumber : Data Primer, 2016 (diolah)*

#### 4.2.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dimaksudkan adalah pendekatan yang digunakan para penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan yang didapatkan dari kombinasi penggunaan strategi dan metode penyuluhan oleh penyuluh yang disesuaikan dengan daerah setempat. Pendekatan dilakukan guna untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan penyuluhan. Pendekatan pada dasarnya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi petani yang ada di daerah dilakukannya

kegiatan penyuluhan tersebut. Penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen menerapkan pendekatan teknis, pendekatan kelompok, pendekatan partisipatif dan pendekatan Latihan dan Kunjungan (LAKU). Penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen juga telah mengalami perubahan dalam memilih pendekatan yang lebih efektif untuk digunakan pada petani di Kecamatan Kepanjen. Paparan terkait pendekatan yang digunakan penyuluh UPT BP Kecamatan Kepanjen untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Pendekatan Penyuluhan di UPT BP Kecamatan Kepanjen

No	Jenis Pendekatan	Keterangan
1.	Pendekatan Teknis	Informasi yang diberikan kepada petani oleh penyuluh didapatkan dari dinas atau lembaga informasi lainnya. Informasi yang diberikan tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Penyuluh memberikan informasi hanya kepada ketua kelompok tani dan ketua kelompok tani yang ditugaskan untuk menyebarkan ke anggotanya.
2.	Pendekatan Kelompok	Melakukan diskusi kelompok pada pertemuan kelompok yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi petani di lahan.
3.	Pendekatan Partisipatif	Petani dilibatkan dalam penyusunan kegiatan penyuluhan baik dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
4.	Pendekatan LAKU	Pendekatan telah dimodifikasi menjadi latihan yang dilakukan dengan cara berdiskusi antara penyuluh dengan petani terkait pemecahan masalah petani dan kunjungan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan akan tetapi tetap berpacu pada Program Penyuluhan.

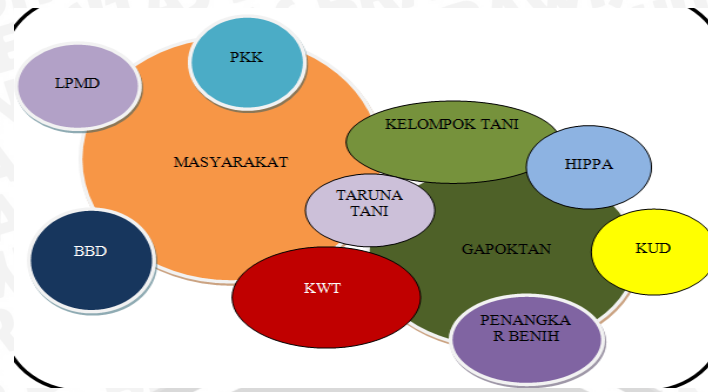
Sumber : Data Primer, 2016 (diolah)

Tabel 13 dijelaskan terkait pendekatan yang digunakan penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen. Pada saat ini, adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No.16 Tahun 2006 menjasikan penyuluh pertanian mengalami perubahan pada penggunaan pendekatan untuk kegiatan penyuluhan. Pendekatan yang digunakan penyuluh sebelum adanya Undang-



Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No.16 Tahun 2006 yaitu pendekatan teknis. Pendekatan teknis yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode *top down*. Pemberian informasi oleh petani didapatkan dari Dinas Pertanian, Balai Informasi Penyuluh Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dan para peneliti terkait penyuluhan. Informasi yang diberikan dari lembaga-lembaga tersebut diserahkan kepada penyuluh untuk disampaikan kepada petani, dan penyuluh memberikan materi tersebut hanya kepada ketua kelompok tani, sehingga ketua kelompok tani yang nantinya akan ditugaskan untuk menyebarkan informasi tersebut. Hal ini tentunya sangat terlihat apabila metode yang digunakan adalah metode *top down* yaitu metode dari atas ke bawah. Selain itu, informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan petani sehingga kurang relevan atau kurang lengkap. Oleh karena itu, tidak semua informasi yang diberikan dapat membantu memecahkan permasalahan petani di lahan. Informasi yang diberikan hanya terkait keputusan untuk mengembangkan praktek-praktek pertanian atau solusi teknologi. Hal ini kurang efektif bagi petani dalam melakukan kegiatan penyuluhan.

Sebaliknya, pendekatan yang digunakan penyuluh setelah adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No.16 Tahun 2006 adalah pendekatan kelompok, partisipatif, dan LAKU (Latihan dan Kunjungan). Pada pendekatan kelompok yang dilakukan penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen adalah dengan melakukan diskusi kelompok melalui pertemuan kelompok. Pendekatan kelompok yang dilakukan melalui diskusi kelompok pada pertemuan kelompok digunakan sebagai pemecahan masalah yang di hadapi petani di lahan. Diskusi yang dilakukan ini tentunya melibatkan petani dalam memberikan pendapat atau gagasan baru dan saling bertukar pikiran baik dari sesama petani maupun petani dengan penyuluh, mantri tani dan *stakeholders* lainnya. Selain itu, dalam diskusi kelompok ini biasanya penyuluh juga mengaitkan dengan penelitian-penelitian yang menyangkut dengan permasalahan yang terjadi. Penelitian-penelitian ini akan membantu petani dalam memecahkan masalah. Jaringan *stakeholders* dalam melakukan kegiatan penyuluhan dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Jaringan *Stakeholders* UPT Kecamatan Kepanjen

Gambar 1 terkait diagram kelembagaan diatas menunjukkan bahwa petani Kecamatan Kepanjen memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberadaan lembaga – lembaga yang ada di kecamatannya. Hal ini nampak dari dekatnya hubungan petani dengan lembaga Gapoktan, lembaga penyuluhan maupun lembaga lain seperti pada gambar diatas. Keberadaan Gapoktan sangat membantu masyarakat dalam kelancaran usaha tani. Sedangkan Kelompok Tani merupakan lembaga pertanian yang sangat membantu petani dalam berorganisasi walaupun saat ini keberadaannya masih belum menyentuh semua lapisan petani.

Dari Gambar 1 diatas juga terlihat ukuran lingkaran yang dimiliki pada setiap kelembagaan berbeda, hal ini diartikan dengan seberapa besar peranan lembaga-lebaga tersebut terhadap masyarakat atau yang disebut dengan petani. keberadaan Gapoktan disini memiliki peranan yang lebih besar terhadap petani, yang artinya Gapoktan memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan lembaga-lembaga lainnya. UPT BP Kecamatan Kepanjen mendirikan Gapoktan dengan harapan agar petani mendapatkan informasi yang lebih banyak terkait dengan dunia pertanian melalui Gapoktan. Selain itu, dalam Gapoktan petani juga dapat berdiskusi dengan sesama petani terkait dengan lahan, budidaya maupun permasalahannya yang lain yang sedang dihadapi petani. selain itu terdapat pula Kelompok Tani dan juga Kelompok Wanita Tani (KWT) yang juga memiliki peranan yang besar bagi petani. dengan adanya Kelompok Tani maupun Kelompok Wanita Tani (KTW), petani dapat bertukar pikiran baik berupa ide maupun gagasan terkait dengan lahan budidaya, tanaman budidaya, permasalahan dilahan dan lain-lainnya. Selain itu tidak berbeda dengan Gapoktan, di dalam Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani petani juga dapat memperoleh



informasi yang dibutuhkan. Mereka juga dapat menyalurkan ide kreatifnya untuk mengelola usaha secara bersama-sama seperti halnya pada Kelompok Wanita Tani yang melakukan Kegiatan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Sedangkan pada lembaga-lembaga yang lainnya, seperti PKK, LPMD, BBD, Taruna Tani, HIPPA, KUD dan Penangkar Benih memiliki peran yang rendah. Hal ini dikarenakan kurang aktifnya lembaga-lembaga tersebut dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para penyuluh pertanian untuk lebih memperhatikan lagi lembaga-lembaga yang kurang aktif. Oleh karena itu, penyuluh pertanian seharusnya memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Kepanjen untuk mengaktifkan kembali lembaga yang kurang aktif seperti PKK, Taruna Tani, KUD dan lain-lainnya. Dengan seperti itu, lembaga-lembaga tersebut dapat bermanfaat bagi kegiatan penyuluhan. Strategi komunikasi yang harus dilakukan oleh penyuluh pertanian adalah dengan membujuk para petani melalui pemberian informasi terkait lembaga-lembaga tersebut yang nantinya akan bermanfaat bagi petani dan juga bagi kegiatan penyuluhan. Akan tetapi, disini penyuluh tidak memaksakan petani untuk ikut serta dalam lembaga tersebut, melainkan lebih kepada pemberian informasi secara perlahan dan didukung dengan bukti-bukti bahwa lembaga tersebut memberikan manfaat bagi petani dan juga kegiatan penyuluhan yang menuju ke perkembangan petani. Penyuluh pertanian melakukan hal ini dengan melalui pendekatan partisipatif.

Pendekatan partisipatif yang dilakukan adalah dengan melibatkan petani dalam melakukan penyusunan kegiatan penyuluhan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Hal ini dilakukan untuk membantu penyuluh dalam melakukan penyusunan. Selain itu, petani juga dapat mengeluarkan pendapat atau gagasan baru terkait perencanaan kegiatan penyuluhan, sehingga peluang untuk penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani akan tercapai. Pendekatan yang lainnya yaitu pendekatan Latihan Kunjungan atau yang sering disebut dengan LAKU. Pendekatan ini juga dilakukan sebelum adanya UU-SP3K. Akan tetapi pada era setelah adanya UU-SP3K, maka para penyuluh memodifikasi metode tersebut. Modifikasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan latihan sesuai dengan program yang ada di daerah tersebut

terkait dengan peningkatan produksi komoditi unggulan. Latihan dilakukan 3-4 kali dalam sebulan pada setiap kelompok tani. Sedangkan untuk kunjungan tidak lagi ditetapkan 3-4 kali dalam sebulan, akan tetapi dilakukan sesuai dengan kebutuhan petani di lahan dengan tetap berpedoman pada Programa Penyuluhan Pertanian. Jadi kunjungan ke kelompok tani tetap dilakukan secara reguler, tetapi dengan prinsip kelompok tani yang banyak masalahnya yang sering dikunjungi. Permasalahan kelompok tani dapat dilihat di Programa Penyuluhan Pertanian dan masalah yang biasanya terjadi terkait dengan budidaya petani.

#### **4.2.3 Strategi Penyuluhan**

Menurut Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No.16 Tahun 2006 pasal 7 ayat 1, strategi penyuluhan disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang meliputi metode pendidikan orang dewasa, penyuluhan sebagai gerakan masyarakat, penumbuhkembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan, keadilan dan kesetaraan gender dan peningkatan kapasitas pelaku utama yang profesional. Strategi penyuluhan sangatlah penting perannya dalam kegiatan penyuluhan. Strategi penyuluhan digunakan agar kegiatan penyuluhan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien bagi petani maupun penyuluh. Strategi penyuluhan dilakukan sesuai dengan Programa Penyuluhan Pertanian yang telah disusun berdasarkan keadaan setempat. Secara garis besar strategi penyuluhan yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan pertanian yaitu mengenai metode dan media penyuluhan.

Terjadi perubahan strategi penyuluhan pasca adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006. Perubahan strategi tersebut mengarah pada perbaikan untuk kegiatan penyuluhan. Terdapat perbedaan antara strategi sebelum dan setelah adanya Undang-Undang tersebut. Penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen sebelum adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No.16 Tahun 2006 menggunakan metode dengan sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU). Metode ini merupakan metode penyuluhan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh sebagai upaya peningkatan kemampuan penyuluh dalam



melaksanakan tugasnya, yang ditindaklanjuti dengan kunjungan kepada petani atau kelompok tani yang dilakukan secara terjadwal. Sistem kerja ini didukung dengan adanya supervisi teknis dari penyuluh senior secara terjadwal dan ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan. Sistem tersebut dirasa efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani.

Seiringnya perkembangan baru dan dengan adanya kebijakan tentang Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No.16 Tahun 2006, penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen mengembangkan strategi penyuluhannya dengan merapkan metode lain yang lebih bersifat partisipatif yang artinya petani dapat ikut serta dalam menyusun strategi yang dilakukan untuk kegiatan penyuluhan. Strategi ini tercermin pada beberapa kegiatan, seperti Optimalisasi Lahan (OPLAH), Demplot, Demfarm, UPSUS, KRPL, Apresiasi Pangan, Penganekaragaman Pangan, *One Day No Rice* dan Program Seribu Desa Mandiri Benih. Metode yang digunakan melalui program-program tersebut akan membantu petani dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilannya. Selain itu, banyak juga keuntungan yang didapatkan petani dalam program tersebut, seperti pengetahuan yang lebih luas tentang pemanfaatan lahan dan benih, ketrampilan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada, peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani dan keluarganya. Selain adanya program-program tersebut, penyuluh juga menerapkan program Sekolah Lapang Pengolahan Tanaman Terpadu (SLPTT) dimulai tahun 2008. SLPTT ini merupakan salah satu program strategis Kementerian Pertanian yang digunakan untuk mendukung peningkatan produksi pangan. SLPTT mulai diuji coba pada tahun 2006 dan 2007, pada tahun 2008 SLPTT mulai diterapkan. Dengan program SLPTT ini, maka kegiatan penyuluhan lebih efektif dikarenakan lebih praktis dan petani juga dapat terjun langsung untuk melakukan praktek.

#### 4.2.4 Pola Penyuluhan

Pengertian akan pola sendiri adalah bentuk atau model yang dapat digunakan untuk membuat atau menghasilkan sesuatu. Sedangkan untuk pola penyuluhan merupakan bentuk atau model yang digunakan para penyuluh untuk membuat perencanaan terkait penyuluhan yang nantinya menghasilkan kegiatan penyuluhan yang efektif. Kebutuhan akan pola penyuluhan sangat penting untuk manusia dapat berinteraksi dengan yang lain karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari berkomunikasi. Begitupun dengan UPT BP Kecamatan Kepanjen yang membutuhkan pola komunikasi penyuluhan yang efektif sehingga dapat mudah menyampaikan informasi mengenai pertanian kepada petani atau kelompok tani, sehingga dalam hal ini UPT BP Kecamatan Kepanjen sangat penting menggunakan bahasa yang tepat dan mudah dipahami untuk menyampaikan informasi. Pencapaian komunikasi yang efektif terjadi apabila setiap petani mencapai pemahaman bersama, merangsang untuk melakukan tindakan dan mendorong petani untuk berpikir dengan cara baru. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif akan menambah pengetahuan yang baik bagi petani, namun kebutuhan pola komunikasi ditunjang dengan arus pola komunikasi, karena tanpa adanya pola komunikasi yang baik maka penyampaian pesan pun tidak akan tersampaikan dengan baik. Pola komunikasi penyuluhan yang digunakan di UPT BP Kepanjen sendiri merupakan saluran yang digunakan penyuluh UPT BP Kepanjen untuk meneruskan pesan dari Dinas Pertanian, Balai Informasi Penyuluh Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dan lembaga-lembaga peneliti lainnya ke petani.

Pola komunikasi penyuluhan yang dilakukan di UPT BP Kecamatan Kepanjen yaitu melalui pendekatan kepada petani menggunakan bahasa verbal dan non verbal. Bahasa verbal yang digunakan penyuluh adalah dengan berkomunikasi dengan menggunakan media, contohnya *handphone*, *power point* leaflet, brosur, pertemuan dan ceramah, sedangkan untuk bahasa non verbal adalah dengan melakukan tindakan seperti praktek atau terjun langsung ke lahan. Maka dari itu, UPT BP Kecamatan Kepanjen membentuk kelompok tani dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan pangan dan meningkatkan pengetahuan bertani yang baik dan benar yang ada di daerah tersebut. Penyuluh pertanian



sangat penting untuk meningkatkan kesadaran petani sebagai sumber pengetahuan dan juga sekaligus meningkatkan kemampuan dalam bertani. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan melalui pelatihan dan sosialisasi berbagai materi pokok kepada kelompok tani langsung. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Zedin (penyuluh berumur 39 tahun) selaku penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen adalah:

*“Pola penyebaran informasi yang dilakukan yaitu melakukan pertemuan kelompok dengan cara ceramah, menjelaskan dengan power point, memberikan leaflet ataupun brosur dan melakukan praktek langsung. Terkadang juga menggunakan handphone jika informasi yang diberikan hanya sekedar menjawab sebuah pertanyaan dari petani, misalnya petani bertanya tentang kadar pupuk, pestisida, jumlah bibit atau penanganan masalah budidaya seperti Penyakit Kresek yang sekiranya tidak terlalu banyak untuk menjelaskan. Informasi yang diberikan petani tersebut didapatkan penyuluh dari ketua UPT BP Kecamatan Kepanjen. Ketua UPT Kecamatan Kepanjen mendapatkan informasi dari Dinas Pertanian, Balai Informasi Penyuluhan Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan lembaga-lembaga peneliti lainnya”*

Dari paparan hasil wawancara tersebut didapatkan bahwa informasi yang diberikan penyuluh kepada petani adalah dengan cara melakukan pertemuan kelompok dengan cara ceramah yang dilakukan tanpa menggunakan media dan pertemuan kelompok yang dilakukan dengan menggunakan media seperti *power point*, *leaflet*, dan brosur. Selain itu, petani juga menggunakan *handphone* sebagai media komunikasi dalam menyebarkan informasi dengan catatan khusus bahwa informasi yang diberikan tidak banyak, yaitu hanya sekedar memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan kepada petani, seperti terkait kadar pupuk, pestisida, jumlah bibit atau penanganan masalah budidaya seperti Penyakit Kresek yang sekiranya tidak terlalu banyak untuk menjelaskan. Penyampaian informasi juga dilakukan dengan praktek atau terjun langsung ke lahan, misalnya dalam melakukan latihan teknologi baru atau program baru seperti UPSUS, Seribu Desa Mandiri Benih, Demplot, Demfarm, Optimalisasi Lahan, KRPL dan lainnya.

Penyampaian informasi juga terkait dengan arus pesan komunikasi. Arus pesan yang dilakukan dalam penyampaian informasi adalah dengan menggunakan metode *top down* yaitu informasi yang didapatkan penyuluh untuk diberikan ke petani berasal dari Dinas Pertanian, Balai Informasi Penyuluhan Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dan lembaga-lembaga penelitian pertanian lainnya. Akan tetapi ada kalanya arus pesan komunikasi dengan metode *bottom up* yaitu dengan petani yang meminta terlebih dahulu materi kepada penyuluh apabila petani tersebut membutuhkan materi terkait dengan permasalahan yang ada di lahan budidayanya, seperti terkait dengan Penyakit Kresek yang menyerang budidaya padi para petani.

Selain itu, dalam pola penyuluhan di UPT BP Kecamatan Kepanjen terdapat bagian-bagian yang mempunyai peranan penting dalam penyampaian informasi. Informasi dapat disebarkan oleh siapapun, hanya saja di dalam penyuluhan ada peranan-peranan tersendiri, seperti *opinion leader* atau orang yang dituakan di dalam penyuluhan tersebut, seperti halnya Bapak Suwarno selaku kepala UPT BP Kecamatan Kepanjen. Pola penyuluhan yang dilakukan di UPT BP Kecamatan Kepanjen adalah dengan cara menyebarkan informasi dalam meningkatkan produksi pertanian di Kecamatan Kepanjen. Hal ini merupakan sebuah proses yang dirancang oleh UPT BP Kecamatan Kepanjen untuk menyebarkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh UPT BP Kecamatan Kepanjen untuk disampaikan kepada petani guna memberikan pengetahuan, pengalaman, berbagai informasi untuk kualitas dari hasil pertanian atau menambah pengetahuan dari petaninya.

#### **4.3 Strategi Baru Komunikasi yang Dilakukan oleh Penyuluh Pertanian**

Penyuluhan pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan pertanian sudah barang tentu dihadapkan pada isu-isu strategis yang slaha satunya adalah isu tentang desentralisasi. Penyuluh pertanian mau tidak mau harus mengalami desentralisasi, karena imbas dari kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah memaksa daerah untuk mampu mengelola diri sendiri, begitupun penyuluhan pertanian di daerah, sehingga penyuluhan pertanian di daerah memiliki kebebasan dalam melaksanakan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Seiring dengan tantangan global dan isu perubahan



lingkungan strategis, layanan penyuluhan pertanian juga mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dari segi perubahan pada organisasi, sistem penugasan, dan praktek sistem penyuluhan pertanian dan pedesaan diseluruh bagian dunia, sehingga menjadi suatu hal yang vital bagi suatu negara untuk menempatkan didi selangkah dengan trend pembangunan terkini.

Seperti halnya di UPT BP Kecamatan Kepanjen yang mengalami perubahan terkait dengan perubahan lingkungan global dan tantangan masa depan penyuluhan pertanian. Hal ini nampaknya perlu digagas strategi penyuluhan pertanian secara lebih intensif dan mendalam terutama tentang kecenderungan terkini dan tantangan masa depan pengembangan penyuluhan pertanian. Adapun strategi-strategi penyuluhan yang harus dilakukan saat ini adalah dengan berpedoman pada Undang-Undang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006. Di dalam UU-SP3K No. 16 Tahun 2006 pasal 7 ayat 1, dikatakan bahwa strategi penyuluhan disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang meliputi metode pendidikan orang dewasa, penyuluhan sebagai gerakan masyarakat, penumbuhkembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan, keadilan dan kesetaraan gender dan peningkatan kapasitas pelaku utama yang profesional.

Pada penelitian kali ini strategi penyuluhan yang diteliti adalah terkait dengan strategi penyuluhan dengan model S-M-C-R. Akan tetapi, sebelumnya, peneliti akan memberikan perbedaan antara strategi penyuluhan yang baru dengan yang lama, yaitu strategi penyuluhan sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan NO. 16 Tahun 2006. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 14. Perbedaan Strategi Komunikasi Penyuluhan di Kecamatan Kepanjen Sebelum dan Setelah Adanya UU-SP3K

No	Indikator	Sebelum UU-SP3K	Setelah UU-SP3K
1.	Penyuluh Pertanian	a. Penyuluh membuat materi kunjungan secara sistematis sesuai dengan informasi yang ingin disampaikan penyuluh. b. Penyuluh menyusun jadwal pertemuan/ kunjungan untuk kelompoktani.	a. Penyuluh memberikan materi yang dibutuhkan petani. b. Penyuluh memberikan pertemuan/ kunjungan sesuai dengan jadwal dari petani/ kelompoktani.
2.	Pesan	a. Penyuluh memberikan materi kunjungan dengan cara penjelasan secara tertulis di papan. b. Penyuluh menyampaikan pesan melalui pendekatan perorangan. c. Pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan petani.	a. Penyuluh memberikan materi dengan menggunakan media komunikasi yang lebih efektif. b. Penyuluh menyampaikan pesan dengan pendekatan kelompok. c. Pesan yang disampaikan sesuai dengan yang dibutuhkan petani.
3.	Media	a. Petani langsung menemui penyuluh bila terdapat permasalahan. b. Radio. c. Televisi.	a. Handphone. b. Internet. c. Demplot. d. Demfarm. e. Brosur . f. Leaflet.
4.	Ketua Kelompoktani	a. Petani tidak mengerti dengan teknologi informasi. b. Petani tidak dapat mengeluarkan pendapat mereka dalam kegiatan pertanian. c. Petani tidak ikut serta dalam perencanaan kegiatan penyuluhan.	a. Petani sedikit mengetahui tentang teknologi informasi. b. Petani dapat mengeluarkan pendapat saat diadakan diskusi kelompok c. Petani ikut serta dalam perencanaan, persiapan hingga pengevaluasian kegiatan penyuluhan.

Sumber : Data Primer, 2016 (diolah)



Tabel diatas merupakan beberapa perbedaan yang signifikan antara strategi komunikasi penyuluhan yang sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006. Untuk lebih jelasnya, maka peneliti akan menjelaskan seperti berikut:

#### **4.3.1 Strategi Komunikasi Penyuluhan-Source**

Strategi Komunikasi Penyuluhan *Source* disini dimaksudkan dengan strategi komunikasi penyuluhan yang dilihat dari segi penyuluh pertaniannya. *Source* yang berarti komunikator/ narasumber yang disini merupakan penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen. Penyuluh sangat berperan aktif dalam suatu kegiatan penyuluhan. Terkait kebijakan baru penyuluhan pertanian dalam kegiatan penyuluhan yang berpedoman dengan Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006 ini memberikan perbedaan dalam hal penyuluh memberikan penyuluhan. Sekarang ini, kegiatan penyuluhan harus terjadwal sesuai dengan program yang dibuat penyuluh setiap tahunnya.

Seperti halnya dalam membuat jadwal pertemuan kelompok tani. Dalam menjadwalkan pertemuan kelompok, pada saat ini bukanlah penyuluh yang menjadwalkan kapan pertemuan kelompok harus diadakan seperti dahulu. Akan tetapi, untuk saat ini petanilah yang meminta penyuluh untuk mengadakan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok diadakan bila petani mendapatkan masalah di lahan budidayanya dan petani ingin menerima materi yang akan disampaikan penyuluh. Pertemuan kelompok diadakan di rumah ketua kelompok tani. Setelah petani meminta penyuluh untuk mengadakan pertemuan, maka biasanya penyuluh akan meresponnya dengan meminta ketua kelompok tani untuk mengumpulkan petani lainnya untuk sebuah pertemuan kelompok. Di era sekarang ini menurut Program Penyuluhan Pertanian, penyuluh dituntut untuk memberikan pertemuan 3-4 kali dalam satu bulan disetiap kelompok tani binaannya. Selain pertemuan juga terdapat sistem kunjungan di lapangan yang dilakukan penyuluh untuk mengontrol petani yang ada di sawah. Kunjungan dilakukan setiap hari senin hingga kamis dan kunjungan dilakukan guna untuk mengontrol kegiatan di lahan. Adapun paparan dari salah satu Penyuluh Pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen yaitu oleh Bapak Ferly (penyuluh berusia 41 tahun) sebagai berikut:

*“Sekarang ini pertemuan itu harus terjadwal. Akan tetapi, sekarang yang terjadwal pertemuan kelompok bukanlah penyuluh, melainkan petani itu sendiri. Karena kenyataan di lapang seperti itu, biasanya petani mengadakan pertemuan saat terdapat masalah di lapang. Misalnya, seperti kemarin ada permasalahan Penyakit Kresek yang menyerang tanaman budidaya mereka. Dan disitu mereka meminta diadakan pertemuan kelompok”*

Dari hasil paparan Bapak Ferly tersebut dapat dilihat bahwa petani menetapkan waktu pertemuan dengan persetujuan penyuluh. Pertemuan kelompok biasanya diadakan bila petani mendapatkan masalah di lahannya, sehingga dengan diadakannya pertemuan tersebut mereka akan dapat mengatasinya. Penyuluh disini akan memberikan materi terkait apa yang sesuai dengan permasalahan tersebut seperti halnya Penyakit Kresek yang menyerang tanaman budidayanya, baik dari segi sebab-akibat adanya masalah, pemecahan masalah serta materi lainnya terkait masalah tersebut.

Selain itu, perubahan strategi komunikasi penyuluhan setelah adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah terkait materi yang disampaikan oleh penyuluh kepada petani. Menurut Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutan No. 16 tahun 2006 pasal 27 ayat 2, materi penyuluhan didefinisikan sebagai bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan. Sebelum adanya UU tersebut, penyuluh memberikan materi yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Hal ini menyebabkan petani sulit untuk menerima informasi yang diberikan penyuluh kepada petani. Sebaliknya dengan adanya UU tersebut, maka penyuluh dituntut untuk memberikan materi sesuai dengan kebutuhan petani. Bukan hanya materi akan tetapi juga pelatihan, sehingga petani dapat mengerti dan menerima dengan baik informasi yang diberikan penyuluh terhadap petani. Adapun paparan dari salah satu ketua kelompok tani terkait penyampaian materi yaitu oleh Bapak Wartono (ketua kelompok tani berumur 38 tahun) adalah:



*“Materi yang diberikan penyuluh dulu tidak sesuai, berbeda dengan sekarang ini. Misalnya, sebagai contoh adanya ancaman hama penyakit seperti Penyakit Kresek yang menyerang padi di lahan budidaya, petani menginginkan penyuluh memberikan pelatihan untuk mengantisipasi penyakit tersebut. Apabila dulu penyuluh hanya memberikan materi bukan dengan pelatihan, berbeda dengan sekarang selain materi, penyuluh juga memberikan pelatihan dalam memecahkan masalah tersebut”*

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa pemberian materi kepada petani lebih efektif pada saat ini karena dengan begitu petani akan lebih mudah menerima dan menangkap informasi yang diberikan penyuluh kepada petani. Hal seperti inilah yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penyuluhan agar lebih optimal lagi.

#### **4.3.2 Strategi Komunikasi Penyuluhan-Message**

Strategi komunikasi penyuluhan *message* yang dimaksudkan adalah strategi komunikasi penyuluhan yang dilihat dari segi materi atau informasi yang disampaikan penyuluh pertanian terhadap petani atau kelompok tani. Materi atau informasi penyuluh pertanian sangatlah penting bagi petani, karena dari materi tersebut petani akan mendapatkan informasi ataupun pengetahuan barunya. Pada era saat ini, penyuluh dituntut untuk melakukan kegiatan penyuluhan dengan berpedoman Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006, hal ini juga termasuk dengan pemberian materi penyuluhan terhadap petani. Menurut Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006, materi penyuluhan didefinisikan sebagai bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan. Materi penyuluhan dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usahatani dengan memperhatikan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pertanian. Karena itu materi penyuluhan pertanian yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usahatani harus diverifikasi terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kerugian sosial ekonomi, lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen saat ini telah merubah strategi komunikasi dalam pemberian materi atau informasi kepada petani setelah adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006 tersebut. Sebelum adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006, strategi penyuluhan yang dilakukan penyuluh dirasa kurang optimal karena materi dan informasi yang diberikan penyuluh pertanian terhadap petani tidaklah sesuai dengan apa yang dibutuhkan petani. Dalam pemberian materi, penyuluh pertanian mengacu pada Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP), sehingga materi yang disampaikan seharusnya sesuai dengan kebutuhan. Namun, kondisi dilapangan terkadang berbeda dengan rencana yang disepakati dalam RKTP. Misalnya, kondisi pertanian yang sulit diprediksi sehingga menjadikan materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan. Seperti, adanya ancaman hama penyakit yang menyerang padi pada kurun waktu tertentu, petani menginginkan seharusnya penyuluh memberikan pelatihan untuk mengantisipasi hama penyakit tersebut.

Selain itu sebelum adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006, penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen menyampaikan pesan dengan menggunakan pendekatan perorangan. Hal ini tentunya kurang efektif dan efisien, dikarenakan waktu yang digunakan relatif panjang. Penyuluh harus mendatangi satu per satu rumah petani untuk melakukan pertemuan dan diskusi mengenai keadaan di lahan. Selain itu, petani juga hanya dapat berdiskusi dengan satu penyuluh saja yaitu penyuluh yang datang ke rumahnya. Penyampaian materi dan informasipun dilakukan penyuluh dengan cara menjelaskan dan memaparkan satu per satu materi dan informasi kepada petani. Penyuluh menggunakan papan tulis atau buku untuk menjelaskan bila diperlukan.

Sebaliknya pada era saat ini, penyuluh menyampaikan pesan dengan menggunakan pendekatan kelompok melalui diskusi kelompok. Penyampaian materi dan informasi juga telah menggunakan media komunikasi baik berupa *power point* dengan menggunakan LCD, brosur maupun *leaflet*. Materi yang disampaikan pun telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan petani. Hal ini tentunya akan membuat petani menjadi lebih dapat menerima materi dan informasi yang



disampaikan penyuluh pertanian. Penyampaian pesan dengan menggunakan pendekatan kelompok melalui diskusi kelompok ini akan membantu petani dalam mengeluarkan pendapat ataupun idenya. Dengan diskusi ini maka petani akan lebih aktif lagi karena petani dapat bertukar pikiran, ide maupun pendapat dengan sesama petani maupun penyuluh. Hal ini tentunya merupakan dampak yang positif bagi kegiatan penyuluhan. Selain itu, penggunaan media sebagai perantara penyampaian materi juga akan mempermudah penyuluh dalam penyampaian materi kepada petani. Dengan power point yang berisi tentang informasi dan materi yang telah disiapkan penyuluh, maka petani lebih tertarik dan lebih memahami. Hal ini juga membawa keuntungan bagi petani dan juga penyuluh. Pemberian materi melalui media komunikasi juga telah diverifikasi terlebih dahulu sesuai dengan informasi apa yang sedang dibutuhkan petani.

#### **4.3.3 Strategi Komunikasi Penyuluhan-Channel**

Strategi komunikasi penyuluhan *channel* dimaksudkan dengan strategi komunikasi penyuluhan yang dilakukan penyuluh yang dilihat dari segi media yang digunakan penyuluh untuk membantu dalam menyampaikan materi dan informasi kepada petani. Media komunikasi sangatlah penting dalam kegiatan penyuluhan pertanian, dikarenakan dengan menggunakan media komunikasi maka akan mempermudah penyuluh pertanian dalam melakukan kegiatan penyuluhan yaitu tentunya dalam menyampaikan materi dan informasi. Media komunikasi yang digunakan penyuluh pertanian dalam kegiatan penyuluhan haruslah sesuai dan harus dapat terjangkau dengan petani, sehingga petani dapat dengan mudah memahami dan menerapkan media komunikasi penyuluhan tersebut.

Pada era saat ini, penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen dituntut melakukan kegiatan penyuluhan dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak media komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan penyuluhan, akan tetapi penyuluh harus dapat mengibangi dengan petani. Sebelum adanya kebijakan yang berpedoman pada Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006, petani mendapatkan informasi melalui media radio dan televisi. Hal

ini tentunya kurang efektif karena siaran di radio dan televisi terkait informasi dunia pertanian terlalu cepat dalam proses penyampaiannya dan tidak dapat diulang. Sehingga dalam hal ini petani sulit untuk menyerap informasi yang disampaikan. Selain itu, dahulu petani menghampiri petani langsung apabila membutuhkan informasi terkait masalah yang dihadapi di lahan. Hal ini juga kurang efektif karena bagi petani akan memakan waktu dan jarak.

Sebaliknya, disaat ini dengan berpedoman Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006 penyuluh mengembangkan media komunikasi yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Saat ini, penyuluh menggunakan media *handphone*, *leaflet*, brosur, Demplot, Demfarm dan internet. Alasan penyuluh mengembangkan media komunikasi penyuluhan adalah agar mempermudah petani dan penyuluh dalam melakukan komunikasi dan mendapatkan materi dan informasi yang dibutuhkan petani. Akan tetapi diantara media komunikasi penyuluhan tersebut, petani lebih memilih *handphone* sebagai media komunikasi dengan penyuluh. Hal ini dikarenakan *handphone* merupakan salah satu alat elektronik yang semua petani dan penyuluh memilikinya. Selain itu, *handphone* juga merupakan media yang paling cepat untuk berkomunikasi dengan penyuluh. Sedangkan untuk internet, kebanyakan petani belum dapat menerapkan dan menggunakan media internet. Hanya beberapa petani saja yang dapat menguasai penggunaan internet. Sedangkan untuk brosur dan *leaflet*, informasi yang berada di media tersebut kurang lengkap (terlalu singkat). Demplot dan demfarm sebenarnya merupakan media yang efektif bagi petani, karena dengan menggunakan media tersebut, petani lebih mengerti secara langsung cara penerapan teknologinya. Akan tetapi, petani lebih memilih *handphone* sebagai media komunikasi yang paling cepat. Dibawah ini merupakan paparan dari salah satu ketua kelompok tani di Kecamatan Kepanjen yaitu oleh Bapak Bambang (ketua kelompok tani berumur 50 tahun) sebagai berikut:

*“Yang paling cepat digunakan untuk berkomunikasi dengan penyuluh itu adalah handphone. Apabila media yang lain yang lebih disukai petani adalah demplot dan demfarm, karena dengan teknologi tersebut petani dapat mudah memahami karena petani dapat melakukan secara langsung..”*



Dari hasil paparan tersebut terbukti bahwa petani lebih memilih media *handphone*, demplot dan demfarm karena dirasa media tersebut lebih efektif dan efisien dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Ketiga media komunikasi penyuluhan tersebut lebih memudahkan dalam penyebaran informasi dan materi. Akan tetapi, meskipun brosur dan *leaflet* kurang diterima oleh petani, media tersebut juga berpotensi sebagai media penyuluhan yang efektif dikarenakan lebih praktis dibandingkan media internet, demplot dan demfarm. Salah satu dari penyuluh juga telah memaparkan bahwa rata-rata petani sekarang telah memiliki media komunikasi *handphone*, meskipun tidak secanggih *handphone* sekarang tapi bagi mereka yang terpenting adalah dapat digunakan untuk menelfon dan mengirim pesan. Berikut paparan dari salah satu penyuluh pertanian yaitu Bapak Sutrisno (penyuluh berumur 50 tahun):

*“Petani sekarang sebagian besar telah memiliki handphone, meskipun tidak secanggih model handphone pada zaman sekarang. Yang terpenting bagi mereka adalah dapat digunakan untuk berkomunikasi, seperti untuk menelfon dan mengirim pesan. Karena bagi mereka di zaman yang sudah modern ini, handphone sangatlah penting untuk berkomunikasi”*

Dari paparan wawancara oleh Bapak Sutrisno didapatkan bahwa sebagian besar petani di Kecamatan Kepanjen telah memiliki *handphone* sebagai media komunikasi utama dalam mengirimkan informasi atau pesan. Meskipun pada kenyataannya tidak semua petani memiliki jenis *handphone* yang canggih seperti sekarang, akan tetapi yang terpenting bagi petani adalah dapat melakukan kegiatan komunikasi, seperti menelfon dan mengirimkan pesan. Bagi petani, *handphone* merupakan media komunikasi yang penting karena seiringnya zaman yang semakin modern, *handpone* menjadi kebutuhan masyarakat.

#### **4.3.4 Strategi Komunikasi Penyuluhan-Receiver**

Strategi komunikasi penyuluhan *receiver* dimaksudkan pada strategi komunikasi penyuluhan yang dilihat dari segi komunikan yaitu ketua kelompok tani (petani). Strategi komunikasi penyuluhan dalam kegiatan penyuluhan tentunya membutuhkan komunikan atau sasaran yang akan dituju. Hal ini tidak lain adalah petani. petani mendapat peran penting dalam kegiatan penyuluhan.

Petani merupakan sasaran yang dituju dalam kegiatan penyuluhan. Petani juga yang akan membantu dalam meningkatkan pembangunan pertanian.

Sebagian besar di Kecamatan Kepanjen memiliki penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani, sehingga tidak diragukan lagi bila Kecamatan Kepanjen terkenal dengan hasil produktivitas pertaniannya terutama komoditas padi. Keberhasilan Kecamatan Kepanjen dalam mendapatkan produktivitas yang tinggi tentunya tidak terlepas dari hasil kerja keras petani, dan petani yang handal juga tidak terlepas dari bantuan penyuluh pertanian. Pada era saat ini, penyuluh dituntut untuk menciptakan petani yang handal. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pedoman penyuluh yaitu Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006 terkait dengan sasaran penyuluhan. Dalam UU tersebut menyatakan bahwa pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran utama yang dimaksudkan adalah pelaku utama dan pelaku usaha, sedangkan sasaran antara penyuluhan meliputi pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

Penyuluh UPT BP Kecamatan Kepanjen berpedoman pada Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006 dalam menghasilkan petani yang handal, sehingga penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen merubah strategi komunikasi yang digunakan. Pada era sebelum adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006, penyuluh pertanian dianggap kurang optimal bagi petani dalam melakukan kegiatan penyuluhan. Hal ini terbukti dari petani yang tidak mengerti dengan teknologi informasi, petani tidak dapat mengeluarkan pendapat mereka dalam kegiatan pertanian serta petani tidak ikut serta dalam perencanaan kegiatan penyuluhan, sehingga petani hanya mengikuti pelaksanaan dari kegiatan penyuluhan. Hal inilah yang mengakibatkan kurang aktifnya petani dalam melakukan kegiatan penyuluhan, karena kegiatan penyuluhan masih terkontrol sesuai dengan rencana yang dibuat oleh penyuluh. Petani juga kurang berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan.



Sebaliknya pada era saat ini yaitu setelah adanya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006, penyuluh yang melakukan kegiatan pertanian dengan berpedoman dengan UU tersebut dapat menghasilkan petani yang lebih baik lagi. Saat ini, petani setidaknya telah mengetahui tentang teknologi informasi yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan guna untuk membantu petani dalam memperoleh informasi yang diperlukan petani. Kedua, petani dapat mengeluarkan pendapat ataupun ide saat diadakannya pertemuan kelompok melalui diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini mengajarkan petani untuk lebih aktif lagi dalam mengeluarkan pendapat mereka serta ide-ide baru yang menjadi inovasi baru dalam kegiatan penyuluhan. Ketiga, saat ini petani dituntut untuk ikut serta dalam keseluruhan kegiatan penyuluhan, seperti menyusun perencanaan kegiatan penyuluhan, persiapan kegiatan penyuluhan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan hingga pada evaluasi kegiatan penyuluhan. Hal ini berguna bagi petani untuk mengeluarkan pendapat dan idenya serta ikut berpartisipasi dalam penyusunan kegiatan penyuluhan. Keuntungan lainnya didapatkan pada penyuluh pertanian, yaitu dengan keikutsertaan petani dalam penyusunan kegiatan penyuluhan maka akan mempermudah penyuluh dalam menyusun kegiatan penyuluhan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyuluh dapat merubah petani menjadi lebih baik lagi dengan melakukan kegiatan penyuluhan berdasarkan Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006. Selain merubah petani menjadi lebih baik, juga dapat mempermudah penyuluh dalam melakukan kegiatan pertanian.

#### **4.4 Tanggapan Penyuluh Pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen Terhadap Strategi Komunikasi di Era Desentralisasi**

Tanggapan penyuluh pertanian merupakan suatu penilaian yang dihasilkan dari pihak penyuluh terhadap penerapan strategi komunikasi yang diterapkan dalam kegiatan penyuluhan. Tanggapan penyuluh pertanian ini sangatlah penting, hal ini dikarenakan tanggapan penyuluh dapat dijadikan sebuah pedoman yang nantinya dapat membantu untuk mengetahui sesuai atau tidaknya strategi

komunikasi yang digunakan penyuluh pertanian dengan pedoman Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K) No. 16 Tahun 2006 di era desentralisasi. Sesuai atau tidaknya strategi tersebut dapat dilihat dari dampak yang terjadi dalam kegiatan penyuluhan baik dari segi petani maupun penyuluh itu sendiri. Apabila dampak yang terjadi cenderung positif, maka strategi tersebut dapat dikatakan cukup efisien dan efektif untuk diterapkan di UPT BP Kecamatan Kepanjen. Akan tetapi sebaliknya, apabila dampak yang terjadi cenderung negatif maka dapat dikatakan bahwa strategi tersebut kurang optimal atau kurang efektif dan efisien dilakukan di UPT BP Kecamatan Kepanjen.

Menurut hasil penelitian, tanggapan penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen terkait penerapan strategi komunikasi dalam kegiatan penyuluhan dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K) No. 16 Tahun 2006 cenderung memiliki dampak positif. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan yang disampaikan penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen terkait strategi komunikasi dalam kegiatan penyuluhan, yaitu:

#### 1. Petani yang Lebih Mandiri

Menurut Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K) No. 16 Tahun 2006, penyuluh pertanian diartikan sebagai proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dirinya dalam mengakses informasi, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesatuan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehingga, petani dibantu agar dapat membantu diri sendiri, dididik agar dapat mendidik diri sendiri. Petani yang membantu diri sendiri dan mendidik diri sendiri merupakan ciri dari petani yang mandiri. Dalam era desentralisasi ini, sangatlah diperlukan petani yang mandiri untuk membantu pembangunan pertanian.



Petani mandiri adalah petani yang secara dinamis mampu memanfaatkan secara optimal sumber daya alam, tenaga, modal dan teknologi yang ada pada lingkungan serta mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini mencakup kemampuan untuk dapat mengatasi segala tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan yang dihadapinya. Petani sebagai manajer mandiri yang berpengalaman, terampil, cakap menilai peluang usaha dan dapat mengambil keputusan sendiri untuk bertindak dan mampu untuk selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Seperti halnya pada penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen yang melakukan kegiatan penyuluhan dengan tujuan menciptakan petani yang mandiri.

Penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen menerapkan Program Seribu Desa Mandiri Benih dari Kementerian Pertanian untuk petani. Program ini ditujukan untuk memperlancar dan menunjang sarana kebutuhan kelompok tani sebagai pelaksana pembangunan pertanian. Program ini dilakukan pada tahun 2016 saat ini. Adanya program ini diupayakan agar kebutuhan benih petani dapat dipenuhi dari produksi petani sendiri sehingga petani mandiri dalam kebutuhan benih yang dibutuhkannya. Petani tidak lagi susah payah dalam mencari benih dengan varietas unggul. Program ini disambut baik oleh para petani dan kelompok tani, karena petani merasa selain dapat memenuhi benih petani sendiri juga dapat memenuhi kebutuhan petani. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara kepada ketua kelompok tani yaitu Bapak Bakri (ketua kelompok tani berumur 40 tahun) dan salah satu penyuluh pertanian yaitu Bapak Sutrisno (penyuluh berumur 50 tahun) sebagai pendukung adalah:

*“Adanya Program Seribu Desa Mandiri Benih ini sangat membantu petani. Banyak sekali keuntungan yang didapatkan petani dari benih yang dihasilkan petani sendiri, misalnya dari hasil jual benih itu sendiri. Dibandingkan dengan beli benih di toko yang harganya mahal dan varietasnya belum tentu bagus”*

(Wawancara dengan Bapak Bakri, 40 tahun)

*“Program Seribu Desa Mandiri Benih ini memiliki dampak yang positif bagi petani. Selain memiliki banyak keuntungan, petani juga dapat menanam benih dengan varietas yang diinginkan, seperti IP. 300, Inpari, Mentik Susu, Pandan Wangi, Padi Hitam, dan Japonica. Varietas disesuaikan dengan lahan budidaya. Selain itu, program ini juga mengajarkan petani untuk lebih mandiri”*

(Wawancara dengan Bapak Sutrisno, 50 tahun)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Program Seribu Desa Mandiri Benih berhasil membuat petani di Kecamatan Kepanjen menjadi lebih mandiri. Petani yang dituntut untuk menghasilkan benih sendiri dengan varietas yang diinginkan, seperti IP.300, Inpari, Mentik Susu, Pandan Wangi, Padi Hitam dan Japonica. Varietas disesuaikan dengan lahan budidaya yang terdapat di masing-masing desa di Kecamatan Kepanjen. Program Seribu Desa Mandiri Benih membuat petani mampu membantu dirinya sendiri dalam mengatasi masalah kesulitan untuk mendapatkan benih. Petani juga mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari hasil benih yang dibuatnya, seperti dari penjualan benih itu sendiri maupun hasil tanaman yang diperoleh dari benih yang dihasilkan. Tanaman yang dihasilkan petani dari benih yang dibuat mampu melebihi hasil tanaman dari benih yang petani beli di toko. Sehingga, dengan keuntungan tersebut, petani mampu membantu diri sendiri dengan mampu mensejahterakan dirinya dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang menuntut agar petani mampu membantu dirinya sendiri.

Selain melalui program tersebut, kemandirian petani di Kecamatan Kepanjen dapat dilihat dari petani yang dapat memecahkan masalah menyangkut permasalahannya dilahan. Pemecahan masalah yang dilakukan petani dengan cara mencari informasi terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi di lahan. Bila petani merasa dapat mengatasinya sendiri, maka petani tidak akan meminta bantuan kepada penyuluh. Hal ini dapat dilihat dari wawancara Bapak Purnadi (penyuluh berumur 50 tahun) selaku Penyuluh Pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen sebagai berikut:

*“Petani sekarang itu, apabila ada masalah di lahan dan mereka dapat mengatasi, maka mereka tidak akan menghubungi penyuluh. Biasanya mereka mencari terlebih dahulu dari buku, internet, leaflet, brosur atau semacamnya. Apabila tidak dapat mengatasi, mereka baru akan menghubungi penyuluh”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petani memiliki kemauan untuk memecahkan masalahnya terlebih dahulu sebelum menghubungi penyuluh. Apabila petani tidak dapat mengatasi, maka petani akan menghubungi penyuluh untuk meminta bantuan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi



dilapang. Petani berusaha memecahkan permasalahan dengan mencari terlebih dahulu tentang masalah yang terdapat dilahan melalui bantuan buku, internet, *leaflet*, brosur maupun semacamnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan penyuluh UPT BP Kecamatan Kepanjen dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006 berhasil menciptakan petani yang lebih mandiri sehingga dapat membantu mensejahterakan diri sendiri dan keluarganya. Strategi tersebut dianggap cukup efektif dan efisien dalam membantu petani dalam meningkatkan produktivitasnya.

## 2. Informasi Sesuai dengan Kebutuhan Petani

Informasi sangatlah penting dalam kegiatan penyuluhan. Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah penyampaian informasi dan teknologi pertanian. Informasi dan teknologi pertanian disebut dengan materi penyuluhan. Materi yang disampaikan dapat berupa pengetahuan baru, inovasi baru atau pun materi tentang pemecahan sebuah masalah di lahan. Menurut Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006, materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan. Sehingga dalam hal ini penyuluh dituntut memberikan materi sesuai dengan yang dibutuhkan petani.

Layaknya pada penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen yang dituntut agar memberikan materi atau informasi sesuai dengan yang diinginkan petani. Sehingga dalam hal ini, penyuluh memberikan materi yang sesuai untuk petani dari bahan materi dasar yang relevan dengan kebutuhan sasaran agar lebih efektif yang dalam arti mampu menyelesaikan permasalahan aktual yang dihadapi petani. Hal ini secara tidak langsung akan mempermudah penyuluh dalam mencari materi, karena materi yang diberikan tidaklah harus menuntun mengenai peningkatan produktivitas. Akan tetapi lebih luas lagi, seperti tentang informasi pasar, pertanian secara global ataupun inovasi-inovasi baru terkait dunia pertanian dengan tetap berpedoman dengan kebutuhan petani. Seperti halnya pendapat dari

Bapak Suwarno (penyuluh berumur 53 tahun) selaku Penyuluh Pertanian sebagai berikut:

*“Setelah adanya strategi baru ini, penyuluh tidak perlu lagi repot-repot mencari materi yang secara luas dan sebenarnya tidak dibutuhkan petani. Penyuluh sekarang lebih mudah dalam mencari materi penyuluhan dikarenakan petani yang meminta materi tersebut”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa penyuluh UPT BP Kecamatan Kepanjen merasa strategi penyuluhan yang digunakan dapat mempermudah petani dalam memberikan materi penyuluhan. Penyuluh tidak perlu lagi mencari materi yang sebenarnya tidak diperlukan petani. selain pendapat penyuluh UPT BP Kecamatan Kepanjen, terdapat pula pendapat dari salah satu ketua kelompok tani di Kecamatan Kepanjen yaitu Bapak Buari (ketua kelompok tani berumur 56 tahun) sebagai berikut:

*“Sekarang penyuluh memberikan materi yang pas. Yang artinya materi yang diberikan adalah materi yang dibutuhkan petani, misal materi tentang sebuah penyakit yang menyerang tanaman budidaya. Berbeda dengan dahulu yang memberikan materi yang membosankan karena tidak sesuai dengan yang dibutuhkan petani”*

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa petani sendiri lebih senang dengan pemberian materi penyuluh pada saat ini, karena petani merasa bahwa materi yang diberikan adalah materi yang sedang petani butuhkan bukan materi yang tidak menarik karena tidak sesuai dengan kebutuhan petani. hal ini menunjukkan bahwa penyuluh pertanian UPT BP Kecamatan Kepanjen berhasil menerapkan strategi komunikasi penyuluhan dengan sesuai memberikan materi penyuluhan kepada petani.

### 3. Kegiatan Penyuluhan Lebih Mudah Dilakukan

Penyuluhan merupakan suatu usaha atau upaya untuk merubah perilaku dengan tujuan agar mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Kegiatan penyuluhan menurut Undang-Undang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006 merupakan kegiatan penyuluhan yang dari, untuk dan oleh petani. sehingga dalam hal ini petani dikutsertakan dalam keseluruhan kegiatan penyuluhan mulai dari



perencanaan hingga evaluasi. Seperti halnya di UPT BP Kecamatan Kepanjen yang penyuluhnya menerapkan perubahan sesuai dengan Undang-Undang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006. Penyuluh yang dahulunya melakukan kegiatan penyuluhan seperti perencanaan, persiapan dan evaluasi sendiri, akan tetapi sekarang penyuluh dituntut untuk mengikutsertakan petani dalam melakukan kegiatan penyuluhan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan penyuluhan. Sehingga dalam hal ini petani ikut berperan dalam semua kegiatan penyuluhan, bukan hanya mengikuti kegiatan pelaksanaan penyuluhan saja. Adapun pendapat dari salah satu penyuluh pertanian yaitu Ibu Rini (penyuluh berumur 36 tahun) sebagai berikut:

*“Untuk sekarang ini, kegiatan penyuluhan lebih efektif dan juga mempermudah para penyuluh dalam melakukan perencanaan, persiapan dan juga evaluasi. Karena sekarang ini petani juga ikut melakukan perencanaan, persiapan dan juga evaluasi bersama dengan penyuluh. Biasanya dilakukan di kantor secara bersama-sama”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan penyuluhan pertanian yang sekarang lebih efektif karena melibatkan petani. Sehingga dalam hal ini, petani dapat mengeluarkan pendapat dalam merencanakan kegiatan penyuluhan. Hal ini akan lebih efektif karena ide yang dikeluarkan untuk kegiatan penyuluhan bukan hanya dari penyuluh saja, akan tetapi juga dari petani. Penyusunan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dilakukan di kantor UPT BP Kecamatan Kepanjen dengan penyuluh dan ketua kelompok tani sebagai perwakilan dari anggotanya. Selain itu, dengan menggunakan strategi tersebut petani secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam perencanaan kegiatan penyuluhan. Hal ini memberikan pendapat yang positif dari salah satu ketua kelompok tani di Kecamatan Kepanjen yaitu Bapak Suryadi (ketua kelompok tani berumur 54 tahun) sebagai berikut:

*“Sekarang ini, untuk menyusun kegiatan penyuluhan yang terdiri dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi itu juga melibatkan petani. Yang dulunya hanya penyuluh pertanian saja, sekarang sudah diubah. Ini dilakukan setelah adanya kebijakan dari pemerintah. Dalam hal ini justru petani merasa senang karena dengan begitu petani dapat mengeluarkan pendapat ataupun aspirasinya. Jadi tidak hanya penyuluh saja yang mengeluarkan ide, tapi petani juga”*

Dari hasil wawancara tersebut sudah terlihat bahwa ketua kelompok tani memberikan respon yang cukup baik dalam penerapan strategi komunikasi penyuluhan yang sesuai dengan Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006. Hal ini dikarenakan petani merasa dihargai akan perannya dalam kegiatan penyuluhan dengan mengeluarkan pendapat atau ide dalam melakukan penyusunan kegiatan penyuluhan pertanian yang terdiri dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen berhasil menerapkan strategi komunikasi penyuluhan sesuai dengan pedoman Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006.

#### 4. Hubungan Petani dan Penyuluh Lebih Akrab

Hubungan antara petani dan penyuluh sangatlah penting dalam kegiatan penyuluhan. Menjalin hubungan yang baik antara penyuluh dan petani akan membawa keuntungan baik bagi petani maupun penyuluh itu sendiri, seperti halnya hubungan yang akrab akan membuat penyuluh lebih mudah mengajak petani menuju penyuluhan yang lebih baik dalam pembangunan pertanian dan juga petani yang lebih mudah mengutarakan pendapatnya dan mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti halnya di UPT BP Kecamatan Kepanjen yang menciptakan keakraban antara penyuluh dan petani melalui pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok merupakan salah satu metode penyuluh pertanian dalam strategi komunikasi penyuluhan. Pendekatan kelompok ini dilakukan dengan penyuluh, mantri tani, pengamat hama dan juga petani itu sendiri. Pendekatan kelompok dilakukan dengan cara diskusi kelompok yang dilakukan dengan sesama peserta kelompok. Pendekatan kelompok ini akan membuat petani dapat mengeluarkan pendapat maupun ide dan inovasi barunya. Terdapat pendapat dari salah satu ketua kelompok tani terkait dengan pendekatan kelompok yaitu dari Bapak Ngadi (ketua kelompok tani berumur 50 tahun) sebagai berikut:



*“Pertemuan kelompok sekarang ini dilakukan dengan berdiskusi, jadi tidak seperti dulu yang hanya mendengarkan penyuluh memberikan materi. Tetapi untuk sekarang petani harus mengeluarkan pendapatnya mbak. Baik itu berupa sanggahan ataupun ide dan inovasi baru. Jadi petani juga dapat bertukar ide dan pendapat dengan penyuluh atau petani lainnya. Menurut saya ini lebih baik sistemnya sekarang dari pada yang dulu”*

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa ketua kelompok tani cukup memberikan respon yang baik dengan pendekatan kelompok. Hal ini dikarenakan petani beranggapan bahwa strategi komunikasi penyuluhan melalui pendekatan kelompok yang dilakukan lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Disini petani dapat mengeluarkan pendapatnya berupa ide maupun inovasi barunya. Selain itu, petani juga dapat bertukar pikiran melalui pendapat atau ide yang dikeluarkan baik dengan penyuluh, matri tani, pengamat hama serta petani itu sendiri. Petani juga berpendapat bahwa strategi tersebut cukup baik dilakukan dibandingkan dengan strategi komunikasi penyuluhan yang dilakukan dengan menerangkan materi saja. Hal ini membuat petani merasa bosan dengan kegiatan pertemuan penyuluhan.

Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006 yang mengatakan bahwa penyuluhan pertanian harus dilakukan dengan sistem pendekatan kelompok. Hal ini dilakukan agar terjalinnya hubungan yang akrab antara penyuluh dan petani. salah satu pendapat dari Penyuluh Pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen yaitu Bapak Ferly (penyuluh berumur 40 tahun) sebagai berikut:

*“Pendekatan kelompok yang diterapkan melalui kegiatan diskusi kelompok ini memang cukup efektif untuk digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Hal ini dikarenakan memicu petani untuk lebih aktif lagi dalam mengeluarkan pendapat mereka yang berupa ide maupun inovasi baru. Selain itu, hubungan antara petani dan penyuluh sendiri menjadi lebih akrab yang diakibatkan dari seringnya berdiskusi antar penyuluh dan petani”*

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa penyuluh pertanian juga menyadari akan keefektifan kegiatan penyuluh dengan menggunakan pendekatan kelompok melalui diskusi kelompok ini. Pendekatan tersebut mengakibatkan dampak positif bagi penyuluh maupun bagi petani, yaitu hubungan yang akrab antara petani dan penyuluh serta keaktifan petani dalam mengeluarkan pendapat. Sehingga dapat

disimpulkan penyuluh berhasil menerapkan strategi komunikasi penyuluhan dengan pendekatan kelompok melalui diskusi kelompok kepada petani sesuai dengan Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006.

#### 5. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Produksi Beras Nasional.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia, salah satunya adalah dengan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan telah menjadi isu yang sangat penting di Indonesia. Masyarakat Indonesia memang telah dikenal mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Bagi Indonesia, pangan identik dengan beras. Sehingga dalam hal ini, peningkatan ketahanan pangan akan berpengaruh pula pada peningkatan beras.

Kecamatan Kepanjen memiliki sumber daya alam yang berpotensi untuk membudidayakan tanaman padi. Hal ini dikarenakan lahan, iklim dan sumber air yang berada di Kecamatan Kepanjen dapat mendukung adanya budidaya padi. Sebagian besar petani di Kecamatan Kepanjen menjadikan padi sebagai tanaman budidayanya, sehingga tidak dapat diragukan lagi bila Kecamatan Kepanjen merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang masuk dalam katagori kecamatan yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan produksi beras nasional. Pada setiap tahunnya produksi beras di Kecamatan Kepanjen meningkat dengan surplus beras 60 ribu ton (Balitbang, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kepanjen dapat meningkatkan produksi beras nasional.

Penyuluh UPT BP Kecamatan Kepanjen dan petani harus mampu memanfaatkan peluang yang ada di Kecamatan Kepanjen seperti sumber daya alam yang memiliki potensi yang baik. Oleh karena itu, penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen dituntut untuk terus membantu petani dalam meningkatkan produksi beras. Peningkatan produksi beras ini tentunya harus didukung dengan kualitas benih yang tinggi agar hasil yang dihasilkan mampu memiliki nilai yang



tinggi pula. Oleh karena itu, di Kecamatan Kepanjen penyuluh mengadakan Program Seribu Desa Mandiri Benih yang berasal dari Kementerian Pertanian dengan dukungan Presiden Jokowi terkait peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Program ini akan membantu petani untuk menghasilkan benih sendiri dengan kualitas yang diinginkan oleh petani dan cocok di lahan budidayanya. Ini tentunya akan mempermudah petani dalam mendapatkan benih dengan kualitas unggul untuk padi yang akan ditanamnya. Di bawah ini merupakan salah satu pendapat ketua kelompok tani yang mengikuti Program Seribu Desa Mandiri Benih di Kecamatan Kepanjen yaitu Bapak Hendry (ketua kelompok tani berumur 54 tahun) sebagai berikut:

*“Program Seribu Desa Mandiri Benih ini sangat membantu petani, petani dapat mendapatkan keuntungan dari adanya program ini, seperti menghasilkan benih yang sesuai dengan keinginan petani dan mendapatkan hasil dari penjualan benih. Setidaknya juga dapat membantu dalam perekonomian petani. Selain itu, hasil benih yang digunakan itu kualitasnya dapat dijamin”*

Hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa ketua kelompok tani memiliki respon yang positif dengan adanya program Seribu Desa Mandiri Benih. Hal ini dikarenakan petani mendapatkan banyak keuntungan dari adanya program Seribu Desa Mandiri Benih ini. Adanya program tersebut dapat membantu petani dalam menghasilkan kualitas beras yang unggul dan dapat meningkatkan pendapatan petani. Sehingga dalam hal ini, secara tidak langsung petani juga membantu dalam peningkatan produksi beras dan ketahanan pangan nasional. Hal ini didukung dengan adanya pendapat dari salah satu penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen Malang yaitu Ibu Ida (penyuluh berumur 31 tahun) sebagai berikut:

*“Program Seribu Desa Mandiri Benih ini mendapatkan respon positif dari petani. Padahal program ini baru dilakukan pada tahun 2016 ini. Akan tetapi respon yang didapatkan dari petani sudah cukup memuaskan. Saya disini sebagai penyuluh juga senang dengan adanya program ini karena selain memiliki banyak keuntungan bagi petani juga dapat mempermudah penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan. Dulu petani masih bingung dalam mendapatkan benih dengan kualitas unggul. Secara tidak langsung penyuluh juga harus ikut membantu dalam mencari benih dengan kualitas unggul. Terkadang juga benih yang dibeli tidak sesuai dengan lahan budidaya sehingga hasilnya banyak yang rusak”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluh juga memberikan respon yang positif dengan adanya Program Seribu Desa Mandiri Benih ini. Hal ini dikarenakan penyuluh mendapatkan keuntungan dari program tersebut, yakni dengan lebih mudahnya dalam melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh yang dulunya merasa terhambat akan sulitnya dalam mencari benih dengan kualitas unggul, sekarang telah diatasi dengan program tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluh telah berhasil dalam melakukan strategi komunikasi penyuluhan yang menurut Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006 terkait dengan peningkatan ketahanan pangan dan produksi beras nasional.

#### **4.5 Hambatan yang Dihadapi Penyuluh Pertanian di UPT BP Kecamatan Kapanjen dalam Menerapkan Strategi Komunikasi di Era Desentralisasi**

Hambatan yang dihadapi penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kapanjen dalam penerapan strategi komunikasi di era desentralisasi ada empat, yaitu:

##### **1. Rendahnya Partisipasi Petani dalam Mengikuti Kegiatan Penyuluhan Pertanian.**

Partisipasi petani terhadap kegiatan penyuluhan sangatlah penting, hal ini dikarenakan partisipasi petani menjadi tolak ukur yang sesuai dalam penilaian kinerja penyuluh pertanian. Apabila partisipasi petani rendah, maka akan berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pengaruh itu dapat terlihat dari hasil evaluasi kegiatan penyuluhan yang efektif atau tidaknya kegiatan penyuluhan tersebut bagi petani. Kefektifan tersebutlah yang akan dijadikan penilaian untuk kinerja penyuluh pertanian.

Petani di Kecamatan Kapanjen memiliki rasa partisipasi yang rendah. Mereka sulit untuk diajak berkumpul dalam mengikuti pertemuan atau kunjungan yang diadakan kelompok tani. Petani juga tidak mau jika pertemuan diadakan pada pagi atau siang hari. Hal ini dikarenakan petani masih bekerja disawah. Sedangkan pada sore hari mereka ingin istirahat dirumah masing-masing, sehingga pertemuan dilakukan pada malam hari dan biasanya pertemuan dilakukan dirumah ketua kelompok tani. Berikut merupakan pendapat dari salah



satu ketua kelompok tani di Kecamatan Kepanjen yaitu Bapak Bakri (ketua kelompok tani berumur 53 tahun) sebagai berikut:

*“Biasanya pertemuan diadakan pada malam hari, karena bila dilakukan pada pagi atau siang hari biasanya petani tidak mau karena pada bekerja di sawah. Tapi biasanya bila malam hari penyuluh, mantri tani atau pengamat hama yang tidak bisa hadir dikarenakan rumah penyuluh, mantri tani dan pengamat hama berjauhan dengan rumah ketua kelompok tani”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa petani kurang tertarik dengan adanya kunjungan atau pertemuan kelompok dikarenakan petani sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Petani hanya dapat melakukan kunjungan atau pertemuan pada saat malam hari saja. Sedangkan jika dilihat dari sisi penyuluh, terkadang pada malam hari justru penyuluh ataupun mitra tani yang tidak dapat hadir dikarenakan faktor jarak antara rumah penyuluh atau mitra tani berjauhan dengan rumah ketua kelompok tani. Hal inilah yang menjadi hambatan dalam kegiatan penyuluhan di UPT BP Kecamatan Kepanjen. Faktor waktulah yang membuat penyuluh bingung dalam menentukan dan menjadwalkan kegiatan kunjungan atau pertemuan. Berikut tuturan dri salah satu penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen yaitu Bapak Ferly (penyuluh berumur 40 tahun) sebagai berikut:

*“Kesulitannya itu mengumpulkan petani, karena petani disini itu rasa partisipasinya sangat kurang. Tidak mungkin kita sebagai penyuluh memaksa petani untuk mengadakan pertemuan. Semua itu harus darikesadaran petani itu sendiri. Padahal untuk sekarang ini, jadwal pertemuan itu diserahkan pada petani. Jadi jika petani menginginkan adanya pertemuan, maka kita akan mengadakan. Jika tidak perlu maka tidak akan diadakan. Padahal untuk sekarang ini, pertemuan harus ada jadwalnya. Dan setiap bulannya setiap kelompok tani harus ada 3-4 kali pertemuan untuk berdiskusi. Baik itu tentang masalah terjadi atau materi baru yang diinginkan petani. walaupun memang tidak bisa diadakan pertemuan biasanya kita berkomunikasi dengan menggunakan hp”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa penyuluh sangat kesulitan dalam mengumpulkan petani untuk mengadakan pertemuan kelompok tani. Hal ini dikarenakan petani di Kecamatan Kepanjen masih memiliki rasa partisipasi yang sangat rendah. Penyuluh tidak mungkin memkasa petani untuk mengadakan pertemuan kelompok tani, karena semua itu harus berasal dari diri

petani itu sendiri. Hal ini sama halnya dengan teori dari Paulo Freire terkait dengan pendidikan orang dewasa yaitu pedagogi dan andragogi. Teori tersebut mengatakan bahwa pendidikan untuk orang dewasa tidaklah bisa dengan memaksa orang tersebut untuk mengikuti apa yang orang lain perintahkan. Sehingga dalam hal ini, penyuluh tidak memaksa petani untuk melakukan pertemuan kelompok. Meskipun pada kenyataannya, untuk era sekarang ini jadwal pertemuan dalam kegiatan penyuluhan harus terjadwal dengan baik di laporan hasil kerja penyuluh pada setiap bulannya. Pada setiap bulannya penyuluh harus melakukan kegiatan pertemuan kelompok tani sebanyak 3 – 4 kali per kelompok tani. Hal inilah yang menjadi hambatan para penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen. Petani mau mengadakan pertemuan jika terdapat masalah atau pun ingin mengadakan pertemuan saja. Sehingga, dalam hal ini terkadang petani dan penyuluh melakukan komunikasi melalui media komunikasi yaitu handphone. Ketua kelompok tani lah yang mewakilkan untuk menghubungi penyuluh dan nantinya informasi penyuluh akan disampaikan oleh anggota kelompok tani. Adapula pendapat dari seorang penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen terkait rendahnya partisipasi petani yaitu oleh Bpk Zedin (penyuluh berumur 38 tahun) sebagai berikut:

*“Disini petaninya memang kurang memiliki rasa partisipasi. Mereka biasanya mau berkumpul bila terdapat program yang dapat menguntungkan petani sendiri, misalnya petani mendapatkan dana dari program tersebut. Bila tidak ada dana petani biasanya sulit untuk diajak melakukan kegiatan tersebut”*

Dari hasil wawancara Bapak Zedin tersebut terlihat bahwa petani di UPT BP Kecamatan Kepanjen lebih memilih ikut kegiatan penyuluhan bila terdapat anggaran dana untuk petani, mereka juga tidak akan mengikuti kegiatan tersebut bila tidak terdapat dana ataupun keuntungan yang akan mereka dapatkan. Oleh karena itu, penyuluh harus pintar dalam melakukan kegiatan penyuluhan agar petani mau ikut berpartisipasi. Padahal pada kenyataannya pertemuan dilakukan 3-4 kali dalam sebulan, sehingga dalam hal ini penyuluh tidak menetapkan waktu akan tetapi disesuaikan dengan keinginan penyuluh dengan tetap berpedoman pada Program Penyuluhan Pertanian. Karena menurut Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 tahun 2006 menyatakan



bahwa petani harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan. Karena partisipasi petani akan memberikan nilai untuk kinerja penyuluh pertanian.

## 2. Rendahnya Pengetahuan Petani dalam Menyerap Teknologi Informasi (TI).

Teknologi Informasi dalam kegiatan penyuluhan sangatlah penting. Kemajuan teknologi informasi akan membantu petani dan penyuluh dalam kegiatan penyuluhan, seperti memberikan materi-materi yang dibutuhkan, berita terkait dunia pertanian baik secara nasional maupun global, perkembangan dunia pasar dan lain sebagainya. Teknologi informasi juga menjadi tolak ukur didalam sebuah kegiatan penyuluhan. Hal ini dikarenakan dengan teknologi informasi, maka penyuluh maupun petani akan mendapatkan pengetahuan lebih terkait dunia pertanian guna memperbaiki dan meningkatkan dunia pertanian sehingga dapat membantu dalam pembangunan pertanian.

Penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan penyuluhannya. Penyuluh dituntut untuk menggunakan teknologi informasi guna mempermudah dalam melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh di Kecamatan Kepanjen sebagian besar telah dapat menerapkan teknologi informasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan semua penyuluh yang menggunakan teknologi informasi dalam melakukan penyuluhan kepada petani. Selain itu, penyuluh juga dituntut untuk mengajarkan dan memberikan arahan kepada petani untuk menggunakan teknologi informasi tersebut. Hal ini sangatlah penting untuk petani karena dengan penguasaan teknologi informasi yang dilakukan petani maka akan membantu petani dalam mendapatkan informasi terkait dunia pertanian. Salah satu pendapat dari penyuluh di UPT BP Kecamatan Kepanjen yaitu Ibu Kartika (penyuluh berumur 30 tahun) sebagai berikut:

*“Memang sulit dalam mengajarkan petani menggunakan teknologi informasi seperti internet ke petani. Karena tidak semua petani mengerti dan mampu menggunakannya. Hal ini dikarenakan karena faktor usia maupun pendidikan yang sangat mempengaruhi dalam mengjarkan internet ke petani. Terkadang ada yang sudah bisa menggunakan, lalu beberapa hari lagi sudah lupa”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa terdapat faktor yang menghalangi petani dalam menyerap teknologi informasi, seperti bila dilihat dari faktor umur dan pendidikan, tidak semua petani dapat menguasai teknologi informasi seperti internet. Petani yang umurnya sudah lebih tua akan sulit untuk menyerap informasi dengan menggunakan teknologi informasi serta sulit mengingat cara dalam penggunaan media internet tersebut. Petani dengan umur yang lebih tua dan sudah mempelajarinya, sulit untuk mengingat kembali dalam rentang beberapa hari. Selain itu, petani yang memiliki pendidikan yang rendah sulit untuk mengerti atau menyerap informasi dalam internet. Hal ini dikarenakan bahasa yang digunakan dalam internet sulit untuk mereka pahami. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi petani dalam melakukan strategi komunikasi penyuluhan di UPT BP Kecamatan Kepanjen terkait dengan teknologi informasi adalah rendahnya petani dalam menyerap dan menggunakan teknologi informasi.

Berbeda lagi dengan peran *handphone* sebagai media komunikasi yang semakin zaman juga dapat digunakan untuk mengakses informasi. Peran *handphone* bagi petani sendiri adalah hanya digunakan untuk berkomunikasi yaitu menelfon dan mengirimkan pesan. Akan tetapi berbeda halnya dengan ketua kelompok tani dan penyuluh yang memiliki *handphone* yang berjenis lebih canggih sehingga dapat digunakan untuk mengakses informasi seperti internet.

### 3. Terbatasnya Dukungan Dana dari Pemerintah Daerah

Dukungan dana dari pemerintah sangatlah penting peranannya dalam kegiatan penyuluhan. Adanya dukungan dana dari pemerintah akan membantu penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan untuk petani. Dana yang diberikan pemerintah biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyuluh maupun petani guna mempermudah kegiatan penyuluhan. Dana yang diberikan pemerintah diberikan pada setiap bulannya. Dana ini merupakan dana operasional yang didapatkan pihak UPT BP Kecamatan Kepanjen dari pemerintah.



Penyuluh UPT BP Kecamatan Kepanjen memiliki hambatan dalam melakukan kegiatan penyuluhan yaitu terkait dukungan dana dari pemerintah daerah. Padahal dapat diketahui bahwa peran dana dari pemerintah sangatlah penting. Dukungan dana pemerintah daerah untuk UPT BP Kecamatan Kepanjen termasuk rendah. Hal ini dikarenakan dana tersebut kurang mencukup dalam pemenuhan kebutuhan kegiatan penyuluhan. Hal ini tentunya akan menghambat kegiatan penyuluhan dan menjadikan kegiatan penyuluhan di UPT BP Kecamatan Kepanjen kurang optimal. Salah satu pendapat dari penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen terkait dukungan dana dari pemerintah daerah yaitu oleh Bapak Sutrisno (penyuluh berumur 50 tahun) sebagai berikut:

*“Apabila berbicara dana dari pemerintah daerah itu termasuk kurang, mbak. Dalam artian belum dapat memenuhi kebutuhan penyuluhan secara optimal. Biasanya apabila kekurangan dana, penyuluh menggunakan dari uangnya sendiri, bila itu memang sangat perlu, karena jikalau tidak dipenuhi maka akan menghambat kegiatan penyuluhan tersebut. Misalnya dalam melakukan kegiatan pertemuan atau kunjungan. Biasanya kegiatan pertemuan dilakukan di rumah ketua kelompok tani dan kantor UPT BP Kecamatan Kepanjen dan otomatis akan memberikan konsumsi atau sarana lainnya. dan bila dana dari pemerintah kurang, penyuluh melakukan iuran. Itu bila tempatnya di UPT BP Kecamatan Kepanjen. Kalau di rumah ketua kelompok tani biasanya dari kas kelompok. Itupun terkadang kas kelompok itu tidak ada”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa rendahnya dukungan dana dari pemerintah akan menghambat kegiatan penyuluhan di UPT BP Kecamatan Kepanjen. Salah satu kegiatan yang terhambat adalah pada kegiatan pertemuan kelompok yang dilakukan penyuluhan guna memberikan materi atau memecahkan permasalahan yang ada di lahan. Hal ini tentunya diperlukan beberapa persiapan seperti adanya konsumsi dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan pertemuan kelompok tersebut. Kegiatan pertemuan kelompok biasanya diadakan di kantor UPT BP Kecamatan Kepanjen dan rumah ketua kelompok tani. Apabila kegiatan pertemuan diadakan di UPT BP Kecamatan Kepanjen, maka penyuluhlah yang harus mempersiapkan kegiatan tersebut dengan memberikan konsumsi maupun saran lainnya. akan tetapi bila dana dari pemerintah sudah tidak cukup dalam memenuhinya, maka penyuluh akan mengadakan iuran dengan sesama penyuluh untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pertemuan tersebut. Begitu pula sebaliknya, bila kegiatan pertemuan diadakan di rumah ketua kelompok tani,

secara otomatis ketua kelompok tanilah yang mengurus adanya pertemuan tersebut. Untuk memenuhi konsumsi dan sarana lainnya biasanya kelompok tani menggunakan dana dari kas kelompok tani. Tidak selalu dana kas kelompok tani itu ada, karena petani malas untuk mengeluarkan dana untuk kas kelompok. Hal inilah yang merupakan salah satu alasan petani malas untuk mengadakan pertemuan kelompok, karena tidak terdapat dana yang membantu diadakannya kegiatan pertemuan. Oleh karena itu, penyuluh merasa terhambat dengan rendahnya dukungan dana dari pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

#### 4. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh beberapa daerah di Indonesia yang terbesar tidak merata, sehingga pemanfaatannya harus digunakan secara arif dan bijaksana agar dapat terus produktif ditengah dinamika pembangunan. Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai basis utama perekonomian nasional. Keberadaan sektor pertanian tidak terlepas dari ketersediaan lahan sebagai media utama dalam meningkatkan produktivitas sektor ini. Namun pada kenyataannya, sekarang lahan yang tersedia semakin sempit seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan infrastruktur telah menggeser pemanfaatan lahan pertanian berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Berubahnya pemanfaatan lahan pertanian ke non pertanian dapat disebut sebagai alih fungsi lahan.

Kecamatan Kepanjen dulunya memiliki lahan pertanian yang cukup banyak. Sehingga rata-rata penduduk di Kecamatan Kepanjen sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Akan tetapi, sejak adanya pemindahan pusat ibukota Malang ke Kecamatan Kepanjen sangat berpengaruh dengan lahan pertanian. Lahan pertanian yang dulunya cukup banyak, sekarang telah digantikan dengan bangunan-bangunan non pertanian seperti bangunan pemerintah dan permukiman. Hal ini merupakan alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Kepanjen yang memiliki dampak negatif bagi dunia pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ini secara tidak langsung akan mengurangi lahan pertanian yang akan



digunakan untuk melakukan kegiatan usahatani. Berikut merupakan tuturan dari salah satu ketua kelompok tani di Kecamatan Kepanjen yaitu Bapak Suyono (ketua kelompok tani berumur 60 tahun) sebagai berikut:

*“Sekarang lahan pertanian di Kepanjen ini semakin berkurang, banyak lahan pertanian yang berubah menjadi bangunan-banguann pemerintah dan perumahan. Ini sebenarnya merugikan petani. Tetapi akhirnya banyak juga petani yang memanfaatkan dengan membuka peluang usaha, misalnya berjualan hasil pertanian seperti buah, membuka toko makanan atau minimarket.”*

Dari pendapat ketu kelompok tani tersebut dapat dilihat bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian memiliki dampak yang merugikan petani seperti kurangnya lahan pertanian untuk budidaya tanaman. Akan tetapi disisi lain, juga terdapat hal yang positif yang dapat dimanfaatkan petani guna tetap memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti membuka peluang usaha dengan berjualan hasil pertanian seperti buah-buahan, mendirikan toko makanan dekat dengan pusat perkantoran pemerintah dan perumahan, mendirikan minimarket yang yang dekat dengan pusat perkantoran dan perumahan.

Akan tetapi berbeda halnya dari segi penyuluhan yang merasa bahwa alih fungsi lahan harus dihentikan karena akan mengurangi lahan pertanian di Kecamatan Kepanjen. Apabila lahan pertanian di Kecamatan Kepanjen semakin lama semakin berkurang, maka tidak akan ada lagi proses budidaya yang dilakukan petani untuk menghasilkan produksi-produksi dengan hasil unggulan. Hal ini pula akan menghambat pembangunan pertanian.

#### **4.6 Strategi Komunikasi Penyuluh Pertanian dalam Pengembangan Kelompok-Kelompok Tani di Kecamatan Kepanjen**

Strategi komunikasi tentunya sangatlah penting untuk digunakan penyuluh pertanian dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Strategi komunikasi dapat membantu penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan. Selain itu, strategi komunikasi juga dapat mempermudah dalam melakukan kegiatan penyuluhan kepada petani. Pada era desentralisasi saat ini, sangatlah penting bagi penyuluh pertanian untuk memiliki strategi komunikasi yang cocok untuk kegiatan penyuluhan dalam pengembangan kelompok tani. Desentralisasi sendiri

merupakan pemindahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya memberikan dampak negatif maupun positif bagi penyuluhan pertanian. Dampak negatif dari desentralisasi inipun akhirnya membuat Pemerintah Pusat membuat kebijakan terkait penyuluhan yang tertuang pada UU-SP3K. Pada UU-SP3K, terdapat beberapa pedoman yang membantu penyuluh pertanian dalam membuat strategi komunikasi untuk kegiatan penyuluhan pertanian. Strategi komunikasi penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen pada era desentralisasi ini sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen sebagian besar telah menerapkan strategi komunikasi penyuluhan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No. 16 Tahun 2006. Dalam UU-SP3K tersebut disebutkan bahwa penyuluhan pertanian pada saat ini bersifat partisipatoris yang memfokuskan kegiatan penyuluhan pada prosesnya. Proses yang dimaksudkan adalah proses yang menuju ke arah pertanian yang lebih baik dan menciptakan petani yang mandiri.

Kegiatan penyuluhan di UPT BP Kecamatan Kepanjen yang sebagian besar telah melakukan strategi sesuai dengan UU-SP3K ini terlihat dari beberapa hal seperti para penyuluh membuat metode penyuluhan yang mengarah pada pengembangan partisipasi petani dengan menggunakan model SMCR, penyuluh saat ini berupaya menjadikan petani di Kecamatan Kepanjen menjadi petani yang mandiri melalui program Seribu Desa Mandiri Benih dan media komunikasi yang digunakan penyuluh dalam melakukan penyuluhan bersifat efektif dan efisien serta dapat terjangkau baik bagi petani maupun penyuluh. Akan tetapi, terdapat hambatan yang dihadapi penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan di Kecamatan Kepanjen yaitu terkait dengan partisipasi petani dalam mengikuti kegiatan penyuluhan dan kurangnya alokasi dana dari pemerintah daerah.

Sesuai dengan UU-SP3K terkait dengan penyuluhan pertanian, dikatakan bahwa penyuluhan pertanian pada era desentralisasi adalah penyuluhan pertanian yang bersifat partisipatoris. Sedangkan pada kenyataannya, di Kecamatan Kepanjen sendiri kegiatan penyuluhan pertanian belum sepenuhnya bersifat partisipatori. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan. Petani di Kecamatan Kepanjen saat ini kurang memiliki rasa



partisipasi untuk mengikuti kegiatan penyuluhan. Penyebab berkurangnya rasa partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan adalah tidak adanya dana dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. Sehingga hal ini tentunya akan menghambat proses kegiatan penyuluhan pertanian. Pada kenyataannya, dana yang diberikan pemerintah daerah hanya mampu memenuhi kebutuhan fasilitas teknis penyuluh pertanian, sedangkan dana yang digunakan untuk proses kegiatan penyuluhan pertanian kurang terpenuhi. Dalam hal ini seharusnya penyuluh mampu mememanajemenkan dana terkait kebutuhan penyuluhan, agar hal ini dapat diatasi.

Terkait dengan strategi komunikasi penyuluhan yang dilakukan penyuluh pertanian UPT BP Kecamatan Kepanjen dengan menggunakan model SMCR dapat dilihat dari S (*Source*) yang merupakan Penyuluh Pertanian. Strategi komunikasi yang digunakan penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen adalah dengan penyuluh pertanian yang memposisikan dirinya bukan lagi sebagai guru, penasehat, penganalisa, organisator maupun penggerak perubahan, akan tetapi penyuluh pertanian lebih memposisikan dirinya sebagai rekan kerja yang melakukan pengembangan untuk pertanian secara bersama-sama. Penyuluh pertanian tidak boleh menggurui apalagi memaksakan kehendak, melainkan harus benar-benar berlangsung sebagai proses belajar bersama yang partisipatif. Selain itu dalam pemberian informasi, penyuluh pertanian tidak lagi memberikan informasi seperti guru yang memberikan informasi kepada muridnya, melainkan lebih seperti berkonsultasi dan berdiskusi bersama. Seperti halnya dalam kegiatan program Seribu Desa Mandiri Benih, penyuluh pertanian memberikan informasi terkait program tersebut secara perlahan kepada petani. Penyuluh pertanian tidak memaksakan petani untuk langsung melakukan program tersebut, akan tetapi penyuluh pertanian memberikan informasi dengan didukung beberapa bukti manfaat dari kegiatan tersebut yang nantinya dapat memberikan keuntungan bagi petani. Sehingga dari proses pemberian informasi tersebut, petani dapat terbujuk dan tertarik untuk melakukan inovasi baru melalui program Seribu Desa Mandiri Benih tersebut.

Sedangkan apabila dilihat dari aspek M (*Message*) yang merupakan informasi atau materi yang disampaikan penyuluh pertanian ke petani, strategi

komunikasi yang digunakan adalah dengan cara penyuluh pertanian UPT BP Kecamatan Kepanjen memberikan informasi terkait materi yang dibutuhkan petani. Materi disesuaikan dengan kebutuhan petani dan tentunya bermanfaat bagi petani. Sebagai contoh dalam program Seribu Desa Mandiri Benih yang mana penyuluh pertanian mendapatkan informasi terkait materi program tersebut dari Kementerian Pertanian. Informasi tersebut nantinya akan disampaikan penyuluh pertanian melalui pertemuan kelompok. Program Seribu Desa Mandiri Benih ini sangat bermanfaat bagi petani di daerah Kecamatan Kepanjen. Hal ini dikarenakan petani di Kecamatan Kepanjen sulit untuk mendapatkan benih unggul yang sesuai dengan kondisi iklim dan lingkungan sekitar. Adapun benih yang dijual dengan harga mahal, sehingga petani Kecamatan Kepanjen tidak kurang mampu untuk membelinya. Oleh karena itu, penyuluh pertanian memberikan program Seribu Desa Mandiri Benih ini guna untuk mencukupi kebutuhan benih di Kecamatan Kepanjen. Dengan adanya program ini, maka petani dapat belajar untuk membuat benihnya sendiri dengan menyesuaikan kondisi iklim dan lingkungan sekitar. Hal ini juga tentunya sesuai dengan UU-SP3K yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kecamatan Kepanjen yaitu lahan yang berpotensi untuk ditanami padi.

Apabila dilihat dari aspek C (*Channel*) yang merupakan media komunikasi yang digunakan penyuluh pertanian UPT BP Kecamatan Kepanjen dalam melakukan kegiatan penyuluhan. Media yang digunakan penyuluh pertanian dalam membantu proses kegiatan penyuluhan adalah *handphone*. Pada era sekarang ini, semua penyuluh maupun petani telah memiliki *handphone* sebagai media untuk berkomunikasi. Hal ini dimanfaatkan para penyuluh pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Seperti halnya dalam memberikan informasi terkait permasalahan, atau konsultasi yang tidak begitu membutuhkan waktu untuk bertemu, maka penyuluh dan petani menggunakan *handphone* sebagai media komunikasi. Selain itu ada pula yang dilihat dari aspek R (*Receiver*) yaitu petani. Pada era saat ini, petani bukan lagi sebagai objek, melainkan sebagai subjek. Penyuluh pertanian melibatkan petani untuk ikut serta dalam perencanaan hingga evaluasi kegiatan pertanian. Sebagaimana yang telah dilakukan penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen yang mengikutsertakan petani dalam



perencanaan kegiatan penyuluhan hingga evaluasi dan juga pengembangan. Begitu pula dalam kegiatan program Seribu Desa Mandiri Benih, petani banyak aktif dalam program tersebut karena program ini memberikan banyak manfaat bagi petani.

Dari strategi yang dilakukan penyuluh pertanian tentang metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan sebagian besar telah sesuai dengan UU-SP3K, yang artinya belum terlalu maksimal. Hal ini dikarenakan penyuluh UPT BP Kecamatan Kepanjen belum sepenuhnya menerapkan metode *bottom up* dikarenakan masih ada beberapa kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan metode *top down*. Seperti halnya dalam melakukan program Seribu Desa Mandiri Benih yang masih melibatkan pemerintah daerah dalam memperoleh bibit gratis, sedangkan petani di Kecamatan Kepanjen sendiri telah mengorganisir sendiri dengan membuat benih sendiri. Hal ini tentunya sesuai dengan teori dalam metode *bottom up* yang melakukan hubungan kerja dengan gotong royong dan kekeluargaan. Program Seribu Desa Mandiri Benih ini dilakukan dengan memfokuskan dalam proses untuk memperoleh bibit yang unggul yang sesuai dengan kondisi daerah. Para penyuluh mengarahkan petani untuk lebih terfokus dalam proses pembuatan bibit yang meliputi asal diperolehnya benih, cara pembuatan benih yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta perawatan benih. Hal ini tentunya akan membantu petani dalam melakukan sebuah usaha untuk dirinya sendiri sehingga dapat membantu petani itu sendiri tanpa menggantungkan pada bantuan pemerintah. Sehingga apabila dana yang diberikan pemerintah kurang cukup memenuhi, maka petani tidak perlu khawatir. Selain itu, kegiatan ini secara tidak langsung telah menciptakan petani yang lebih mandiri tanpa tergantung pada pemerintah daerah.

Apabila dilihat dari strategi komunikasi yang dilakukan penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen, maka dapat dikatakan bahwa penyuluh pertanian di UPT Kecamatan Kepanjen telah berusaha melakukan strategi komunikasi sesuai dengan UU-SP3K. Akan tetapi adanya hambatan terkait dengan dana dan partisipasi petani yang kurang, maka seharusnya penyuluh pertanian dapat mengatasinya dengan mencari jaringan komunikasi yang lebih banyak lagi sehingga dapat membantu dalam kegiatan penyuluhan pertanian di

Kecamatan Kepanjen dan menciptakan *leadership* yang tidak harus berasal dari penyuluh. Jaringan komunikasi yang didapatkan bukan hanya dari mantri tani atau badan penyuluhan lainnya, akan tetapi jaringan komunikasi dapat berasal dari perusahaan swasta atau semacamnya. Hal ini dilakukan guna membantu petani dalam memperoleh dana. Penyuluh disini berperan sebagai perantara antara petani dengan jaringan komunikasi tersebut, sehingga petani dapat berkomunikasi langsung dengan jaringan komunikasi tersebut. Sedangkan pada pembuatan *leadership* oleh penyuluh dilakukan guna sebagai fasilitator. *Leadership* yang berasal bukan dari penyuluh ini, dapat membuka kesempatan petani menjadi aktor utama dalam kegiatan penyuluhan. Sesuai dengan UU-SP3K dengan menggunakan metode *bottom up* yang menyatakan bahwa petani saat ini bukan lagi menjadi objek akan tetapi menjadi subjek, karena kegiatan penyuluhan pertanian pada saat ini bukan hanya untuk petani tetapi dari, oleh dan untuk petani. Petani Kecamatan Kepanjen sebagian belum menjadi subjek dalam kegiatan penyuluhan, hal ini dikarenakan partisipasi petani yang kurang. Akan tetapi sebagian lagi telah menjadi subjek karena mereka merupakan sebagian dari petani yang aktif dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa strategi komunikasi yang digunakan para penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen pada era desentralisasi saat ini sudah cukup efektif untuk digunakan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa dampak positif yang terjadi baik dari segi petani maupun penyuluh. Dampak positif ini didukung dengan tanggapan yang sebagian besar memiliki nilai positif, seperti petani yang menjadi lebih mandiri melalui program Seribu Desa Mandiri Benih, Informasi yang didapatkan sudah sesuai dengan kebutuhan petani, kegiatan penyuluh lebih mudah dilakukan karena lebih terarah dengan menggunakan pedoman UU-SP3K, hubungan petani dan penyuluh yang jauh lebih akrab melalui diskusi kelompok antara petani dan penyuluh, dan meningkatkan ketahanan pangan dan produksi beras nasional.



#### **4.7 Point Penting dalam Penelitian Strategi Komunikasi Penyuluh Pertanian dalam Pengembangan Kelompok Tani pada Era Desentralisasi di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang**

Penelitian terkait Strategi Komunikasi Penyuluh Pertanian dalam Pengembangan Kelompok Tani pada Era Desentralisasi dilakukan di UPT BP Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan pertimbangan karena UPT BP Kecamatan Kepanjen merupakan unit pelaksana teknis balai penyuluhan yang terletak di Kecamatan Kepanjen yang mana salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang terkenal akan produksi berasnya. Hal ini dikarenakan Kecamatan Kepanjen memiliki iklim dan lahan yang berpotensi tinggi untuk ditanami padi. Selain itu, UPT BP Kecamatan Kepanjen memiliki misi untuk menjadikan petani di Kecamatan Kepanjen menjadi petani yang mandiri, maju dan menguntungkan untuk kesejahteraan keluarga tani. Program UPT BP Kecamatan Kepanjen juga memperhatikan kebutuhan dan aspirasi petani yang terserap melalui mekanisme komunikasi yang efisien dan efektif seperti supervisi, temu wicara, pelatihan dan kunjungan lain-lain yang tentunya memperhatikan faktor sosial, ekonomi dan kemampuan masyarakat dan aparat yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian (RKPP). Sehingga, UPT BP Kecamatan Kepanjen memiliki rencana kegiatan penyuluhan yang sesuai dengan tujuan, keadaan lingkungan dan petani setempat. Berdasarkan UU-SP3K pada era desentralisasi ini, Kecamatan Kepanjen belum diketahui apakah telah menerapkan strategi komunikasi penyuluhan berdasarkan UU-SP3K.

Dalam hal ini, UPT BP Kecamatan Kepanjen penting dilihat dari konteks regional/nasional/internasional, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Pertanian yang merupakan sektor utama dalam mendukung perekonomian baik nasional maupun internasional ini membuat pembangunan ekonomi menjadikannya sebagai langkah prioritas untuk meningkatkan perekonomian nasional maupun internasional. Hal ini tentunya menjadikan sektor pertanian memiliki peranan penting bagi pembangunan perekonomian baik dalam jangka panjang maupun dalam pemulihan perekonomian. Akan tetapi pada saat ini, sektor pertanian yang didalamnya mencakup penyuluhan pertanian telah dihadapkan oleh berbagai isu yang

menghambat dalam pencapaian keberhasilan pembangunan pertanian. Isu-isu tersebut muncul baik dari global, nasional maupun lokal. Salah satu isu global yang menghambat dalam pencapaian keberhasilan pembangunan pertanian yaitu terkait dengan liberalisasi pasar global dan ketidakadilan perdagangan internasional. Selain itu, permasalahan lainnya terkait dengan komitmen internasional dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) untuk mewujudkan ketahanan pangan dunia, menurunkan kemiskinan, dan mewujudkan kelestarian lingkungan. Isu global tersebut memiliki dampak secara global bagi dunia pertanian. Dampak dari isu global tersebut berupa transformasi penyuluhan pertanian yang saat ini sedang berlangsung di seluruh bagian dunia. Transformasi yang dimaksudkan adalah terjadinya suatu perubahan pada organisasi, sistem penugasan, layanan penyuluh pertanian dan praktek sistem penyuluhan pertanian dan pedesaan di seluruh bagian dunia. Oleh karena itu, diperlukannya suatu langkah strategis baru yang perlu dilakukan agar lebih sesuai dengan sistem penyuluhan pertanian.

Selain adanya isu global dalam sektor pertanian yang terdapat di berbagai bagian negara, ada pula isu lainnya seperti halnya yang terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia. Keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia pada saat ini masih terhambat dengan adanya isu-isu strategis yang dihadapi oleh Indonesia pada abad 21 yaitu seperti isu desentralisasi, yang diakibatkan dengan adanya otonomi daerah. Isu strategis ini memberikan perubahan lingkungan strategis bagi penyuluhan pertanian. Cara mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang pada abad 21, diperlukan sumber daya manusia yang handal untuk mewujudkan pertanian yang tangguh, produktif, efisien dan berdaya saing sehingga dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Cara tersebut dapat terwujud melalui penyuluhan. Penyuluh memegang peranan penting dalam membimbing petani agar dapat memberikan yang terbaik dalam pengelolaan usahatani yang dilakukannya. Akan tetapi di Indonesia, kinerja penyuluh pertanian terbilang masih rendah. Rendahnya kinerja penyuluh pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tentang peranan penyuluhan pertanian; (2) keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan penyuluhan pertanian daerah oleh



pemerintah daerah; (3) ketersediaan dan dukungan materi informasi pertanian sangat terbatas; (4) penurunan yang terus berlangsung terhadap kapasitas dan kemampuan manajerial dari petugas penyuluh pertanian, serta (5) penyuluh pertanian kurang aktif untuk mengunjungi petani dan kelompoknya. Solusi untuk melakukan peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Indonesia, pemerintah pusat melakukan kebijakan melalui otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah ini telah memberikan ruang gerak terhadap isu-isu strategis yang dihadapi oleh pembangunan pertanian di Indonesia yaitu isu tentang desentralisasi. Desentralisasi merupakan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Subejo *et al.*, 2006), sehingga pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian bertanggung jawab hanya pada penyusunan dan manajemen strategi, kebijakan nasional dan standar-standar.

Desentralisasi dipandang penting karena membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam memantau kebijakan pemerintah. Akan tetapi, desentralisasi dalam otonomi daerah ini berpotensi memberikan dampak negatif, seperti perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dengan anggota DPRD dalam memahami penyuluhan pertanian dan perannya dalam pembangunan pertanian, kecilnya alokasi anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan penyuluhan pertanian, ketersediaan dan dukungan informasi pertanian sangat terbatas dan makin merosotnya kemampuan manajerial penyuluh (Mawardi, 2004).

Seiring dengan adanya isu dampak negatif dari desentralisasi tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU-SP3K) yang mengamanahkan lembaga penyuluhan beserta penyuluh. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU-SP3K), penyuluh pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk

meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian serta pembangunan pertanian yang lebih baik.

Slamet (2007) mengemukakan bahwa hingga saat ini tidak semua daerah telah melaksanakan dan menghasilkan perubahan-perubahan sesuai dengan UU-SP3K. Seperti halnya di UPT BP Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang belum diketahui seberapa jauh penerapan strategi komunikasi penyuluhan yang diterapkan penyuluh setelah adanya UU-SP3K. Kecamatan Kepanjen yang merupakan sentra beras ini menunjukkan bahwa kinerja penyuluh pertanian dalam membimbing petani-petani yang bergabung dalam kelompok tani memiliki pengaruh besar. Akan tetapi, kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Kepanjen diduga belum optimal. Belum optimalnya penyuluh pertanian di Kecamatan Kepanjen dilihat dari observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti. Diduga teknik penyuluhan pertanian yang dilakukan di Kecamatan Kepanjen sebagian besar masih menggunakan teknik penyuluhan *top down* yang merupakan salah satu metode penyuluhan pertanian dari atas ke bawah yang artinya penyuluh pertanian lebih aktif dibandingkan petani. Penyuluh pertanian di UPT BP ini masih lebih aktif dibandingkan dengan petani-petani yang bergabung dalam kelompok tani binaannya. Kelompok tani di Kecamatan Kepanjen masih kurang perhatian akan adanya kegiatan penyuluhan pertanian.

Penyebab dari kurang perhatian dan aktifnya kelompok tani ini diduga dari kurangnya lahan pertanian yang disebabkan dari pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pemindahan ibu kota Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen mengakibatkan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Lahan-lahan pertanian yang dulunya digunakan petani untuk mengelola sumber pendapatannya, kini telah menjadi bangunan-bangunan yang digunakan untuk pemerintahan. Sehingga hal ini mengakibatkan penduduk yang dulunya mengutamakan petani sebagai pekerjaan utama, berubah menjadi pekerjaan sampingan. Oleh karena itu, Penyuluh pertanian di WKPP melakukan modifikasi strategi komunikasi dalam pengembangan kelompok tani di era desentralisasi ini guna mempermudah pemberdayaan petani dalam meningkatkan produktivitasnya,



seperti mengubah metode komunikasi penyuluhan, mengembangkan penggunaan media komunikasi penyuluhan, memberikan informasi yang dibutuhkan petani dan mendapatkan tanggapan yang bermanfaat bagi petani maupun penyuluh. Akan tetapi, belum diketahui apakah strategi-strategi tersebut sesuai dengan UU-SP3K. Sehingga, peneliti bermaksud meneliti tentang strategi komunikasi para penyuluh dalam pengembangan kelompok-kelompok tani di era desentralisasi.

Penelitian ini menggunakan metode sensus dan teknik *purposive sampling* dalam menentukan partisipan. Metode sensus adalah metode yang ditujukan untuk semua anggota populasi yang dijadikan sebagai sampel (Sugiono, 2001). Metode sensus digunakan pada 9 responden Penyuluh WKPP (Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian) yang ada pada UPT BP Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan di UPT BP Kecamatan Kepanjen hanya memiliki 9 penyuluh. Sedangkan, *purposive sampling* menurut Sugiyono (2012:126) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *key informan* untuk mendapatkan informasi terkait strategi komunikasi yang digunakan penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen. Pada penelitian ini, yang disebut dengan *key informan* yaitu orang-orang yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak mengetahui) mengenai hal-hal yang sedang diteliti. *Key informan* dalam penelitian ini yaitu Ketua Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani. Pemilihan ketua kelompok tani dengan pertimbangan bahwa ketua kelompok tani memiliki informasi yang lebih banyak seputar implementasi penyuluh pertanian, serta dapat memberikan informasi pendukung lainnya yang lebih jelas lagi untuk penelitian ini. Teknik *purposive sampling* ini digunakan pada 11 petani (6 ketua kelompok tani dan 5 anggota kelompok tani) yang ada di Kecamatan Kepanjen.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Wawancara mendalam yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada Penyuluh WKPP dan ketua kelompok tani. Dengan menggunakan alat perekam, peneliti meminta izin kepada partisipan yaitu Penyuluh WKPP dan ketua kelompok tani agar bersedia untuk diwawancarai dengan alat perekam untuk memperoleh hasil wawancara yang akurat dan agar tidak kehilangan informasi. Sedangkan observasi adalah

pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan, seperti kegiatan kunjungan di lahan dan pertemuan kelompok di rumah ketua kelompok tani. Kejadian ini dicatat dan didokumentasikan sebagai data peneliti. Dokumentasi yang dilakukan berupa foto untuk mendapatkan data yang lengkap, seperti dokumentasi kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan penyuluhan. Sedangkan, teknik pengabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2005:178). Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber yang merupakan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 2001). Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan cara mencari sumber lain sebagai pembanding data yang diperoleh dari narasumber. Sumber yang dimaksud adalah dari partisipan yang berbeda yaitu antara penyuluh dengan ketua kelompok tani dan dari penelitian terdahulu. Pemeriksaan dan pengecekan dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan wawancara dan observasi dengan teori yang digunakan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini adalah data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miller dan Huberman (1984) bahwa dalam analisis data deskriptif mencakup pengumpulan data, reduksi data, kesimpulan dan verifikasi.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga kegiatan utama yang peneliti ikuti selama penelitian di UPT BP Kecamatan Kepanjen, seperti kegiatan diskusi kelompok, kunjungan lapangan dan pembuatan program. Kegiatan diskusi kelompok merupakan salah satu strategi yang dilakukan penyuluh pertanian di UPT BP Kepanjen. Diskusi kelompok dilakukan melalui pendekatan kelompok. Pada pendekatan kelompok yang dilakukan penyuluh pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen adalah dengan melakukan diskusi kelompok melalui pertemuan kelompok. Pendekatan kelompok yang dilakukan melalui diskusi kelompok pada pertemuan kelompok digunakan sebagai pemecahan masalah yang di hadapi petani di lahan. Diskusi yang dilakukan ini tentunya melibatkan petani dalam



memberikan pendapat atau gagasan baru dan saling bertukar pikiran baik dari sesama petani maupun petani dengan penyuluh, mantri tani dan *stakeholders* lainnya. Selain itu, dalam diskusi kelompok ini biasanya penyuluh juga mengaitkan dengan penelitian-penelitian yang menyangkut dengan permasalahan yang terjadi. Penelitian-penelitian ini akan membantu petani dalam memecahkan masalah. Diskusi kelompok biasanya dilakukan di rumah ketua kelompok tani.

Kegiatan kunjungan lapangan dilakukan melalui pendekatan Latihan dan Kunjungan (LAKU). Pendekatan ini dilakukan dengan kegiatan latihan sesuai dengan program yang ada di daerah tersebut terkait dengan peningkatan produksi komoditi unggulan. Latihan dilakukan 3-4 kali dalam sebulan pada setiap kelompok tani. Sedangkan untuk kunjungan tidak lagi ditetapkan 3-4 kali dalam sebulan, akan tetapi dilakukan sesuai dengan kebutuhan petani di lahan dengan tetap berpedoman pada Program Penyuluhan Pertanian. Jadi kunjungan ke kelompok tani tetap dilakukan secara reguler, tetapi dengan prinsip kelompok tani yang banyak masalahnya yang sering dikunjungi. Permasalahan kelompok tani dapat dilihat di Program Penyuluhan Pertanian dan masalah yang biasanya terjadi terkait dengan budidaya petani.

Kegiatan Pembuatan Program Penyuluhan dilakukan bersama dengan petani. Hal ini tentunya bertujuan agar petani dapat ikut berpartisipasi dalam seluruh kekuatan penyuluhan yang di mulai dari kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi. Program Penyuluhan UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Kepajen memperhatikan kebutuhan dan aspirasi petani yang terserap melalui mekanisme komunikasi yang efisien dan efektif seperti supervisi, temu wicara, pelatihan dan kunjungan dan lain-lain, yang tentunya memperhatikan faktor sosial, ekonomi dan kemampuan masyarakat dan aparat yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian (RKPP). Tujuan Program Penyuluhan Pertanian adalah memberikan arahan dan bimbingan yang kondusif dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah, membangun kesediaan dan kesiapan para pelaku dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian yang dirumuskan secara rinci dalam bentuk yang konkrit dan partisipatif pada setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan perencanaan yang telah disusun secara bersama-sama dan masukan dari masyarakat, mengatur pendayagunaan tenaga,

peralatan, sarana, dana serta sumber potensi yang ada sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan menjadi acuan dasar bagi penyuluh pertanian untuk menyusun program rencana kegiatan penyuluhan pertanian.

Sehingga dalam hal ini, peneliti mendapatkan pengalaman penting dalam melakukan penelitian, seperti halnya pengalaman tersebut diambil dari kegiatankegiatan yang telah peneliti lakukan di UPT BP Kecamatan Kepanjen. Pada kegiatan pertama yaitu kegiatan diskusi kelompok. Kegiatan diskusi kelompok dilakukan di rumah ketua kelompok tani. Biasanya kegiatan diskusi ini dilakukan pada malam hari. Saya mengikuti kegiatan kelompok di salah satu rumah ketua kelompok tani yang bernama Bapak Wartono. Pada kegiatan diskusi tersebut, yang menghadiri adalah salah satu penyuluh pertanian yaitu Bapak Ferly, mantri tani, pengamat hama, ketua kelompok tani dan anggota kelompok tani. Kegiatan tersebut membahas terkait Penyakit Kresek yang terjadi pada tanaman padi para petani. kegiatan diskus tersebut membahas mulai dari pengertian, penyebab dan cara mengatasinya Penyakit Kresek tersebut. Disana saya juga ikut berdiskusi terkait cara mengatasi Penyakit Kresek tersebut, sehingga saya ikut berdiskusi dengan penyuluh, mantri tani, pengamat hama dan juga petani.

Pada kegiatan kedua yaitu kegiatan kunjungan lapangan yang dilakukan peneliti. Kegiatan kunjungan lapangan ini dengan melakukan kunjungan kepada petani yang berada di lahan budidaya. Saya melakukan kunjungan lapangan bersama salah satu penyuluh pertanian yang bernama Bapak Ferly. Bapak Ferly mengajak saya untuk melakukan kegiatan kunjungan bersama beliau ke beberapa daerah yang merupakan wilayah kerja Bapak Ferly. Dalam kegiatan kunjungan lapang ini, penyuluh bertugas untuk mengontrol para petani. Selain itu, penyuluh juga akan bertanya kepada petani apakah terdapat hambatan yang mereka hadapi dalam budidayanya. Apabila terjadi hambatan, maka penyuluh akan menawarkan adanya kegiatan diskusi kelompok.

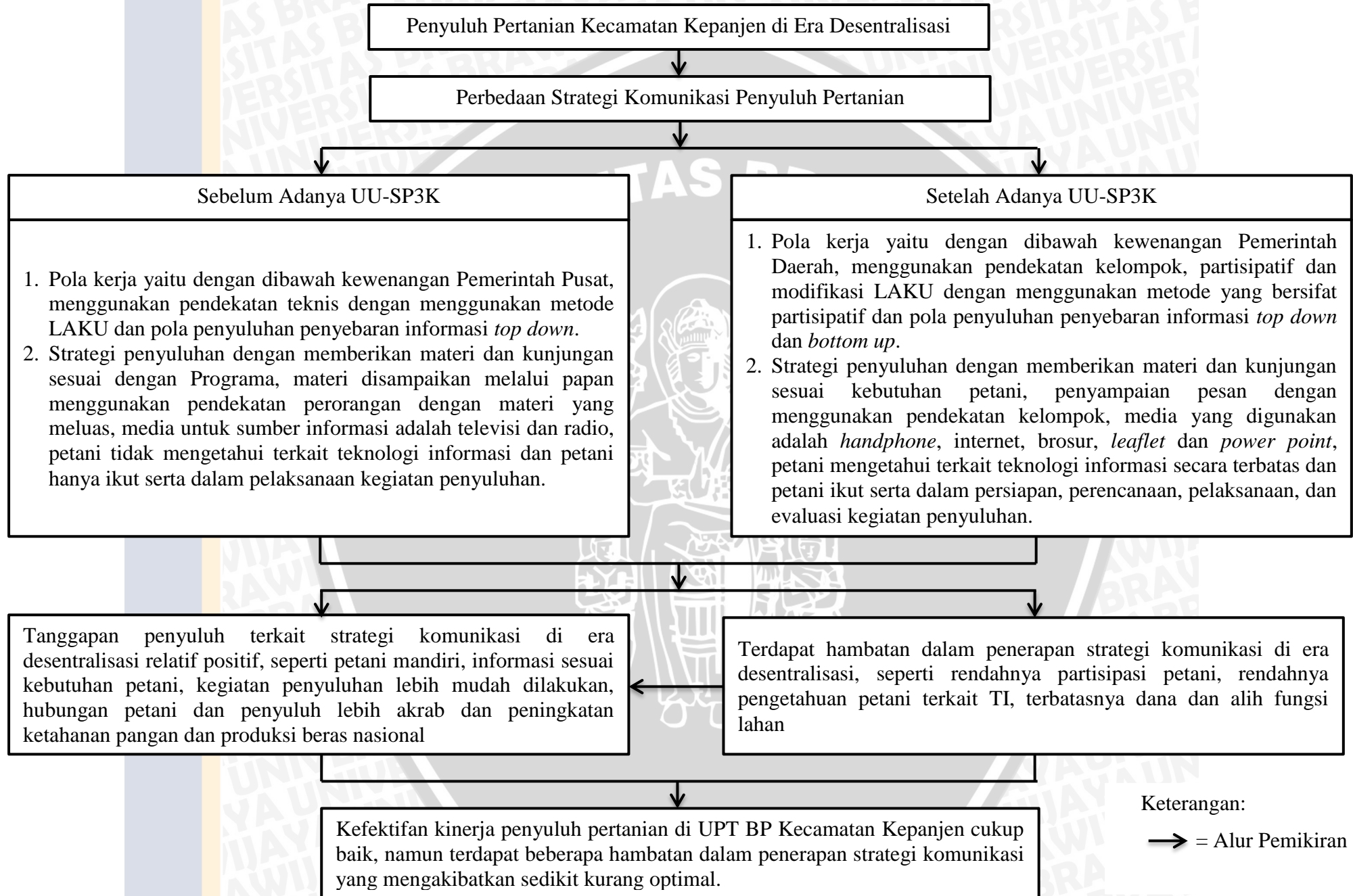
Dan yang terakhir yaitu Kegiatan pembuatan Programa Penyuluhan. Pada kegiatan program, saat mengikuti kegiatan tersebut yang mana kegiatan tersebut dihadiri para penyuluh, mantri tani dan petani. Pada kegiatan ini, saya melihat bahwa petani ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan perencanaan kegiatan



penyuluhan. Petani juga ikut dalam mengeluarkan gagasan yang disesuaikan dengan kebutuhan petani serta kondisi lingkungan. Dalam kegiatan ini pula terdapat diskusi antara petani, penyuluh dan mantri tani yang mana akan menghasilkan strategi yang akan dilakukan dalam kegiatan penyuluhan.

Sehingga dari penelitian tersebut, peneliti juga mendapatkan tiga pelajaran yang didapatkan, yaitu peneliti mengetahui perbedaan strategi komunikasi Penyuluh Pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen sebelum dan setelah adanya UU-SP3K di era desentralisasi, mengetahui tanggapan Penyuluh Pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen terhadap strategi komunikasi di era desentralisasi dan dapat mendiskripsikan potensi hambatan yang dihadapi Penyuluh Pertanian di UPT BP Kecamatan Kepanjen dalam menerapkan strategi komunikasi di era desentralisasi.





Skema 3. Ringkasan Pembahasan Terkait Strategi Komunikasi Penyuluh Pertanian UPT BP Kapanjen di Era Desentralisasi